



**PERANAN AMERIKA SERIKAT DALAM PROSES PERDAMAIAN
ISRAEL DAN PALESTINA TAHUN 1991-2002**

SKRIPSI

Oleh

**Qoriatu Shofiah
NIM 130210302007**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PERANAN AMERIKA DALAM PROSES PERDAMAIAN ISRAEL DAN
PALESTINA TAHUN 1991-2002**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program
Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Qoriatus Shofiah

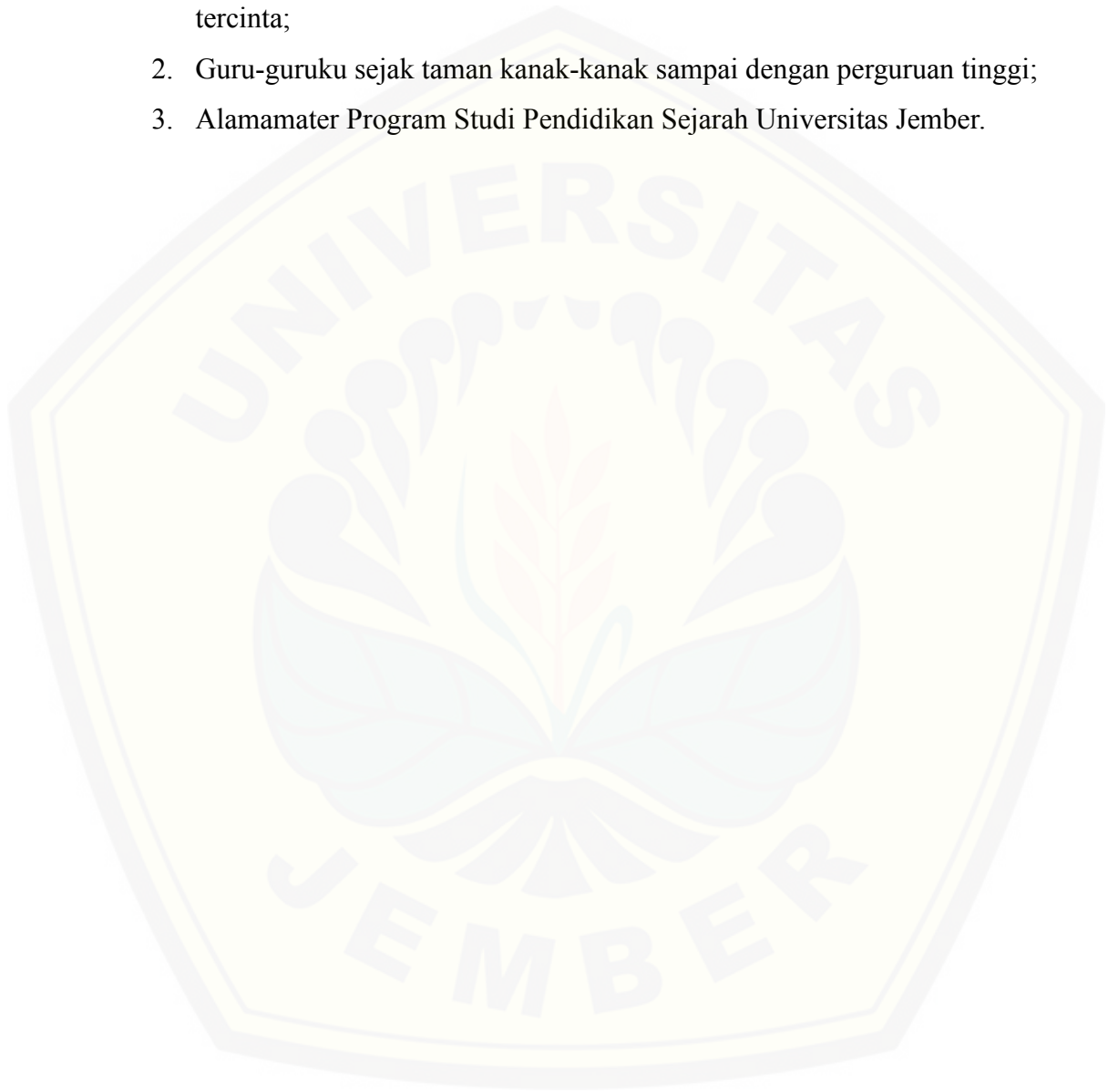
NIM 130210302007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Mujayanah ayahanda Alm. Ahmad Zaeni dan Slamet Riadi yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Alamamater Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember.



MOTO

Perdamaian adalah keindahan hidup, ia laksana sinar mentari. Perdamaian adalah
Senyum seorang anak kecil cinta seorang ibu, kebahagiaan seorang ayah
Kebersamaan keluarga, perdamaian adalah kemajuan manusia
Kemenangan keadilan, kemenangan kebenaran
Perdamaian adalah semua itu dan lebih
Dan lebih dari semua itu
(Menachem Begin, 1978)¹⁾

¹⁾ Kuncahyono, T. 2010. Jerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir. Jakarta: Kompas

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qoriatus Shofiah

NIM :130210302007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,

Qoriatus Shofiah

NIM 130210302007

SKRIPSI

**PERANAN AMERIKA DALAM PROSES PERDAMAIAN ISRAEL DAN
PALESTINA TAHUN 1991-2002**

Oleh
Qoriatus Shofiah
NIM 130210302007

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sumarjono, M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina tahun 1991-2002” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 20 Februari 2018

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Marjono, M.Hum.
NIP 196004221988021001

Anggota I,

Dr. Sumardi, M.Hum
NIP 196005181989021001

Sekretaris,

Drs. Sumarjono, M.Si.
NIP 195808231987021001

Anggota II,

Drs. Sugiyanto, M. Hum.
195221041984031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Prof. Dafik, M.Sc.. Ph.D.

NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002; Qoriatus Shofiah, 130210302007; 2017: xii+69 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang sudah lama terjadi. Konflik Palestina dan Israel merupakan konflik yang krusial, konflik ini sudah berlangsung cukup lama, bermula ketika Israel memproklamasika berdirinya negara Israel di tanah Palestina dan tentu saja hal tersebut menimbulkan kemarahan penduduk Palestina yang sudah turun-temurun mendiami wilayah tersebut. Banyak negara yang terlibat didalamnya baik persoalan dalam konflik nya maupun dalam upaya penyelesaiannya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah (1) mengapa Amerika melakukan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tahun 1991-2002; (2) apa saja upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam perdamaian Israel Palestina 1991-2002; (3) mengapa Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam penyelesaian perdamaian Israel dan Palestina 1991-2002. Tujuan penelitian ini antara lain (1) untuk menganalisis lebih dalam latar belakang Amerika dalam Upaya perdamaian di Israel dan Palestina; (2) untuk mengkaji lebih dalam Upaya Amerika dalam perdamaian Israel Palestina; (3) untuk mengkaji lebih dalam hasil yang dicapai dalam penyelesaian Israel dan Palestina. Manfaat dari penelitian ini antara lain: (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat mengetahui secara jelas mengenai latar belakang, upaya, dan hasil yang dicapai Amerika dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina; (2) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; (3) bagi peneliti lain, sebagai motivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis sekaligus mengembangkannya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dengan langkah-langkah: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

Hasil dari pembahasan yaitu Amerika Serikat melakukan upaya Perdamaian antara Israel dan Palestina Karena dilatarbelakangi berbagai hal seperti minyak dan stabilitas kawasan. Demi melindungi dua kepentingan tersebut Amerika pun mengundang pihak Israel dan Palestina untuk berunding guna mencapai perdamaian, Amerika berhasil membawa kedua belah pihak dalam perundingan Madrid, Oslo, Wye River, Camp David. Setelah perundingan tersebut kedua belah pihak berhasil mencapai beberapa kesepakatan, namun ada juga beberapa hal yang terus diperdebatkan oleh kedua belah pihak. Hal yang diperdebatkan adalah masalah kota Jerusalem. Dan akhirnya karena kota Jerusalem ini perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina gagal, karena kedua belah pihak tidak pernah mau kompromi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah latar belakang Amerika melakukan upaya perdamaian adalah untuk kepentingan nasional Amerika berkaitan tentang minyak dan demokrasi. Upaya Amerika dalam menyelesaikan konflik adalah dengan memaksa kedua belah pihak untuk hadir dalam meja perundingan, dan dalam meja perundingan Amerika juga berperan sebagai mediator ataupun tuan rumah yang menyediakan fasilitas. Upaya Amerika mendamakan Israel dan Palestina akhirnya kandas di pertemuan Camp David tahun 2000 saat kedua negara dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak mau membagi kota Jerusalem. Tidak terpecahkannya masalah Jerusalem ini yang menyebabkan gagalnya proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan bagi pihak Amerika Serikat seharusnya bersikap lebih adil dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Saran kedua bagi Israel agar tidak serakah dalam mengambil hak tanah warga Palestina, patuhi resolusi-resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB, untuk Palestina jangan hanya menggunakan kekerasan dan ingin menang sendiri. Saran ketiga bagi negara- negara Islam dan negara yang terlibat dalam konflik maupun proses penyelesaiannya tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tercapai hubungan yang harmoni.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Amerika dalam proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002” dengan lancar dan tidak banyak hambatan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dafik, M.Sc, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumadi, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember;
5. Drs. Marjono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, Drs. Sumarjono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, Dr. Sumardi, M.Hum selaku Dosen Penguji I, dan Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu;
7. Irfan Bayu Anggara terimakasih untuk semangat dan bantuan;
8. Teman-teman, Sisca, Acis, Lusi, Lely, Relis, Uvie, Fisa, Nila, dan Tria atas dukungan dan doa;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Jember, Mei 2017

Penulis

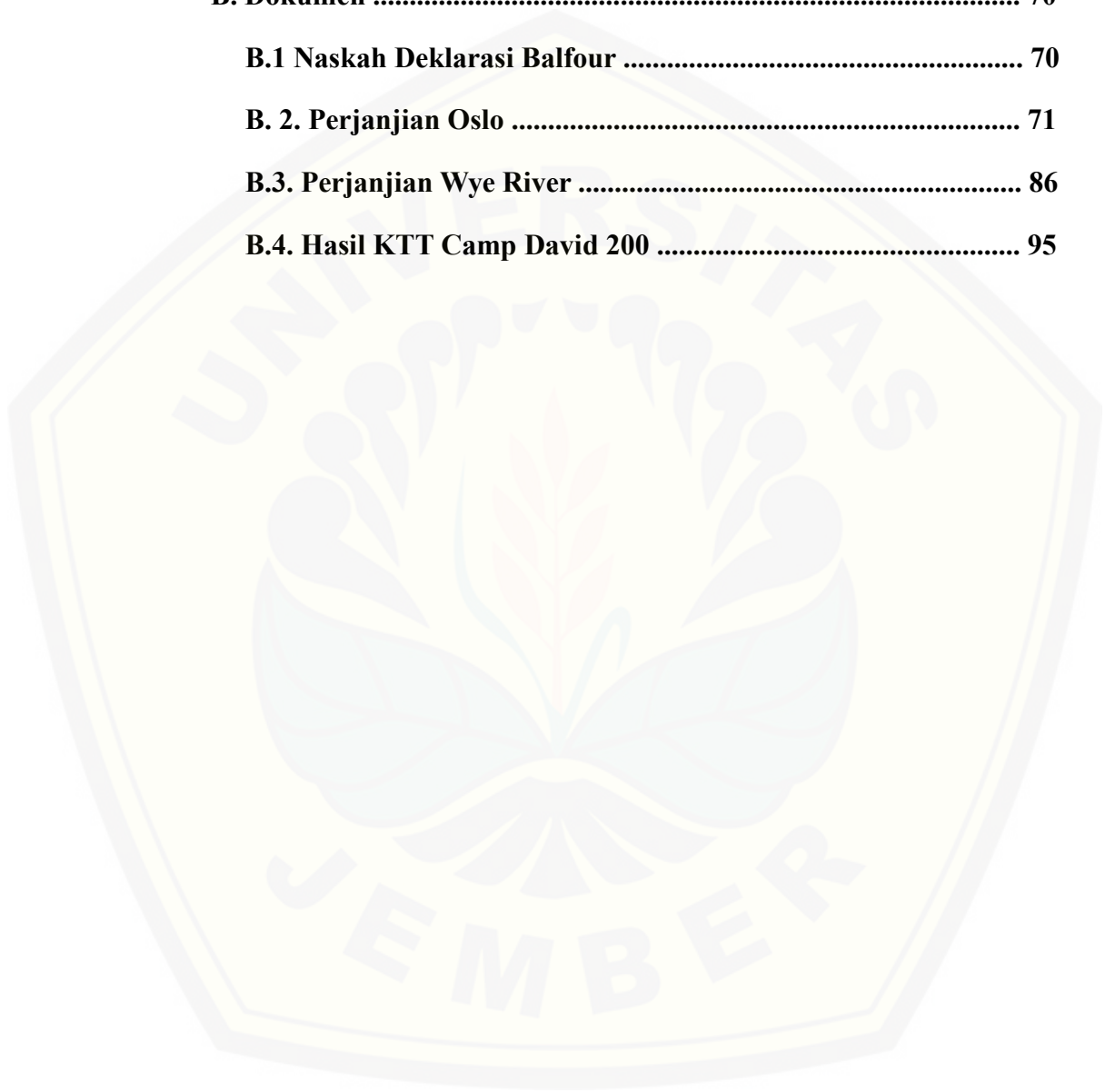
DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTO.....	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Judul	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB 3. METODE PENELITIAN	17
BAB 4 LATAR BELAKANG UPAYA AMERIKA DALAM PERDAMAIAN ISRAEL DAN PALESTINA TAHUN 1991-2002 ..	22
4.1. Konflik Israel dan Palestina	22

4.2. Kepentingan Nasional Amerika	26
4.3. Berakhirnya Perang Teluk II	31
BAB 5. UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM PROSES PERDAMAIAN ISRAEL	36
5.1. Strategi Amerika Serikat menarik Israel dan Palestina ke Meja Perundingan Tahun 1991-2002	36
5.2. Langkah Amerika Serikat dalam Perundingan Damai Israel dan Palestina Tahun 1991-2002	44
BAB 6 AKHIR DARI PROSES PERDAMAIAN ISRAEL PALESTINA TAHUN 1991-2002	54
6.1 Kegagalan Proses Perdamaian	54
6.2 Penolakan Yaser Arafat	58
BAB 7. PENUTUP	63
7.1. Simpulan	63
7.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69
A. Matrik Penelitian.....	69
B. Dokumen	70
B.1 Naskah Deklarasi Balfour	70
B. 2. Perjanjian Oslo	71
B.3. Perjanjian Wye River	86
B.4. Hasil KTT Camp David 2000	95

DAFTAR LAMPIRAN

A. Matrik Penelitian.....	69
B. Dokumen	70
B.1 Naskah Deklarasi Balfour	70
B. 2. Perjanjian Oslo	71
B.3. Perjanjian Wye River	86
B.4. Hasil KTT Camp David 200	95



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemenangan Amerika Serikat dalam perang Teluk dan perang dingin menyebabkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal. Sebagai pemenang perang Teluk Amerika Serikat bebas untuk melakukan segala kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, untuk melaksanakan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Untuk mengatur kembali keamanan hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan mendamaikan konflik yang Israel dan Palestina agar kepentingan Amerika Serikat dapat terjamin.

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik dunia Internasional yang terjadi lama sekali. Konflik berlangsung selama kurang lebih setengah abad yang melibatkan banyak negara seperti Arab, Eropa dan Amerika (Hermawati, 2005:1). Konflik ini berawal ketika Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia I. LBB menyerahkan Palestina kepada Inggris yang pada saat itu menjadi bagian kekuasaan Turki Utsmani. Setelah LBB (kemudian berubah menjadi PBB) mengakhiri mandat pemerintahan Inggris pada tahun 1948 kemudian membaginya menjadi dua negara yaitu wilayah yang dikhususkan bagi warga Yahudi dan warga Arab. Keputusan PBB tersebut menuai protes dari rakyat Palestina yang sudah lama menempati wilayah tersebut. Ambisi Israel yang berkeinginan menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan dan meningkat menjadi perang dalam skala yang lebih luas (Hermawati, 2005:1). Dalam hal ini kedua belah pihak saling mengklaim dan merasa bahwa tanah Palestina adalah tanah yang di peruntukan bagi masing-masing pihak.

Kalau dirujuk kembali ke belakang pada tanggal 2 November 1917 Menteri Luar Negeri Inggris, James Balfour dalam surat menyuratnya kepada Presiden Federal Zionis Inggris, Lord Walter Rothschild, mengemukakan gagasan agar wilayah Palestina yang pada waktu itu merupakan wilayah mandat Inggris

dijadikan pemukiman untuk masyarakat Yahudi (Widya,2015:50). Setelah penandatanganan perjanjian Balfour Inggris mengakui hak-hak Yahudi dan bersedia menyediakan fasilitas guna terbentuknya suatu tempat tinggal yang bersifat nasional bagi Yahudi (Hermawati, 2005:95). Isi yang tercantum dalam surat tertanggal 2 November 1917 yang ditunjukkan kepada Rothschild mengenai adanya rencana untuk menjadikan Palestina sebagai tempat bagi orang Yahudi. Oleh karena itu Perang Dunia I menjadi tonggak penting bagi kaum Yahudi ketika Israel menggagas ide tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kaum Yahudi, tanah yang akan diambil yaitu di Palestina (Nurdi, 2006:39). Hal ini terjadi karena lobi Zionis pada pihak Inggris, sehingga Inggris telah banyak menerima bantuan dari Yahudi pada Perang Dunia I dan II.

Pada tahun 1948 Ben Gureon memproklamasikan berdirinya Negara Israel. Pendirian negara Israel ini menyebabkan munculnya permusuhan dengan negara Arab seperti Mesir, Yordania, Syiria, Lebanon, dan Irak. Negara Arab tersebut mendukung bangsa Palestina. Hal ini menyebabkan permusuhan antara Palestina dan Israel berkembang menjadi konflik internasional. Konflik tersebut menyebabkan perang Arab-Israel yang bersumber pada konflik Palestina Israel (Hermawati,2005:7). Perang yang terjadi antara Arab Israel antara lain perang tahun 1948, perang enam hari (1967), dan perang Yom Kippur 1973. Beberapa konflik yang terjadi antara negara Arab dan Israel mengakibatkan campur tangan Amerika Serikat, untuk mengakhiri konflik tersebut.

Berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya Uni Soviet melahirkan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal. AS semakin bebas melakukan campur tangan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah (Husein, 1995:vii). Kekuasaan Amerika yang sangat besar diharapkan menjadi satu-satunya tumpuan bagi perdamaian antara Israel dan Palestina. Banyak pihak yang berfikir hanya Amerika lah yang bisa mewujudkan perdamaian tersebut (Husein, 1995:vii). Kenyataan tersebut mengisyaratkan bahwa secara diplomatis, politis, dan psikologis Israel tetap berada dalam posisi yang strategis untuk mencapai beberapa target dan tujuan perdamaian yang paling menguntungkan Israel karena sikap Amerika yang lebih dekat dengan Israel.

Selama ini dalam hubungan internasional dengan negara lain, Amerika selalu dibayangi dengan kepentingannya sendiri kepentingan untuk menguasai kawasan di Timur Tengah yang memiliki nilai vital dan strategis. Dalam konteks politik Amerika seringkali berpihak pada Israel untuk dijadikan batu pijakan dan menjalankan kepentingannya yang besar untuk mewujudkan ambisinya dalam politik di Timur Tengah (Habibullah, 1994;19). Sementara kemenangan Amerika Serikat dan sekutunya dalam perang Teluk II tahun 1990 telah mengubah drastis peta politik dan militer Timur Tengah. Kekuatan militer Israel menjadi super power regional di Timur Tengah dan tanpa pesaing (Rais, 1993:3). Sementara Amerika menganggap negara Arab lain seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Syria sudah jatuh dalam pengaruhnya, Amerika Serikat secara militer juga hadir di Kawasan Timur Tengah, terutama di kawasan Kuwait dan Arab Saudi.

Penyelesaian konflik Israel dan Palestina merupakan kunci pokok bagi perdamaian dan keamanan di Timur Tengah. Hal ini karena konflik ini tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina saja, akan tetapi hampir seluruh negara Arab di Timur Tengah bahkan dunia Internasional. Amerika berpendirian bahwasanya tidak ada saat yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak kecuali menarik Israel dan Palestina ke dalam meja perundingan. Namun langkah yang dilakukan Amerika Serikat dalam usulan mencapai perdamaian tersebut memiliki wajah ganda. Sesungguhnya upaya perdamaian Israel dan Palestina hampir menjadi kenyataan ketika *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang diwakili Oleh Yasser Arafat dan Israel oleh Yitzak Rabin dan Simon Perez serta di tengahi oleh Bill Clinton di Wasington 1993 (Husein, 1995:viii). Dunia internasional menyangka bahwa pertemuan tersebut menjadi jembatan menuju perdamaian.

Perdamaian yang diupayakan oleh Amerika ternyata berjalan tidak adil, yang menjadi pertanyaan penting adalah sulitnya penyelesaian konflik ini mencapai titik temu dari sikap masing-masing pihak. Amerika tidak memberikan jaminan apapun untuk Palestina, tidak memberikan sanksi apapun untuk memaksa Israel agar menghentikan pembangunan pemukiman di daerah pendudukan. Padahal masalah pemukiman Yahudi inilah yang menjadi salah satu penyebab

konflik Israel dan Palestina. Kehadiran Amerika dalam proses perdamaian di Timur Tengah apakah memang memberikan dampak yang baik bagi terciptanya perdamaian atau malah sebaliknya campur tangan Amerika dapat menyebabkan permasalahan baru seperti tumbuhnya peperangan, pertikaian, dan perpecahan di Timur Tengah.

Alasan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam peran Amerika dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina yaitu dikarenakan perdamaian yang disponsori Amerika ini merupakan yang paling berhasil daripada upaya perdamaian yang dilakukan sebelumnya. Jika sebelumnya usaha yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak hanya menghasilkan sebuah resolusi yang tidak pernah ditaati oleh kedua pihak yang berkonflik. Maka sekarang Amerika dapat menarik kedua belah pihak ke meja perundingan, padahal Israel dan Palestina enggan untuk berunding.

Sementara jika proses perdamaian ini tidak segera diwujudkan akan menimbulkan konflik menyeret negara-negara lain terlibat di dalamnya. Konflik akan mengganggu keamanan, dan stabilitas politik, dan ekonomi di Timur Tengah. Pada intinya proses perdamaian Israel dan Palestina menjadi kunci pokok keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Selain fakta mengenai Amerika sebagai pihak mediator memang benar-benar menginginkan perdamaian di Timur Tengah khususnya Israel dan Palestina terwujud, apa yang akan didapatkan Amerika jika kedua belah pihak dapat berdamai. Hal ini mungkin saja terjadi jika ditinjau ulang mengenai masalah yang terjadi, kedua negara tersebut tidak mau mengalah antara satu dengan lain. Pada tahun 1948 Guerion memproklamasikan kemerdekaan negara Israel, menjadi tonggak awal permusuhan antara Israel dan Palestina (Hermawati, 1995:67). Setelah itu negara Israel mendapatkan wilayah yang lebih luas 50% dari yang diminta dalam pemisahan oleh PBB.

Setelah berakhirnya perang enam hari tahun 1967 Israel menguasai wilayah Sinai, Jalur Gaza, dan tepi barat sungai Jordan. Selama ini Israel ingin mencaplok wilayah Palestina seperti wilayah yang berhasil diduduki oleh Israel yaitu wilayah yang subur, serta Israel berhasil menguasai 90 persen sumber air. Akibatnya rakyat Palestina melakukan perlawanan melalui berbagai cara seperti

gerakan Intifaldah. Jika konflik ini terus berlanjut maka perdamaian yang di upayakan oleh Amerika tidak akan segera terwujud. Sebelumnya sudah banyak upaya pemecahan baik melalui jalur diplomatik maupun kekerasan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai namun semua itu belum mampu membuat keadaan menjadi lebih baik, yaitu tercapainya perdamaian.

Walaupun Amerika sudah mengupayakan proses perdamaian antara Israel dan Palestina akan tetapi belum berhasil dengan baik, sampai sekarang masih bermusuhan. Mengapa Amerika yang memiliki kekuatan yang sangat besar tidak dapat mendamaikan Israel dan Palestina perlu dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina masih terus di upayakan sampai terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah dengan judul “Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina tahun 1991-2002”.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan menghindari terjadinya salah pengertian, penegasan pengertian judul juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul “Peranan Amerika dalam Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002”.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009:212), jadi peranan adalah sebuah tindakan seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa. Peranan Amerika Serikat dalam Proses perdamaian adalah untuk mendamaikan konflik Israel dan Palestina dengan bentuk perjanjian-perjanjian yang diprakasai oleh Amerika Serikat

Israel adalah sebuah negara Kecil di pinggir Laut Tengah. Israel resmi menjadi sebuah negara pada tahun 1948. Sebelah utara berbatasan langsung negan Libanon, Yordania dan Syiria berada disebelah timur, sedangkan sebelah barat

berbatasan dengan Mesir. Tel Aviv, Jerusalem dan Haifa adalah kota penting Israel. Israel adalah negara Yahudi yang dikelilingi oleh negara-negara Arab yang mayoritas beragama Muslim. Rakyat Israel memiliki kebudayaan atau bergaya hidup Barat akan tetapi hidup di tengah masyarakat dengan kebudayaan Timur (Sihbudi, 1995:102)

Galtung (dalam Windhu, 1992) mendefinisikan ada dua pengertian Perdamaian yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan antar personal. Sedangkan perdamaian positif adalah tidak adanya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah suasana yang harmoni, perdamaian yang dimaksud adalah meniadakan kekerasan antara Israel dan Palestina yang sudah lama berkecamuk

Palestina adalah sebuah negara yang merdeka pada tanggal 15 November 1988. Wilayah Palestina dibagi menjadi tiga bagian oleh PBB meliputi Palestina, Israel dan Jerusalem sebagai kota Internasional. Wilayah Palestina sendiri terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, dimana sebelumnya wilayah Palestina lebih luas. Akan tetapi wilayah ini berhasil di duduki oleh Israel, dan wilayah Palestina sekarang semakin menyempit.

Berdasarkan uraian diatas, maksud yang terkandung dalam judul “Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002” adalah tindakan Amerika Serikat dalam mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina tahun 1991-2002. Amerika Serikat berusaha meredakan kekerasan, dengan cara menarik Israel dan Palestina ke dalam meja perundingan. Seperti Konferensi Madrid (1991) Perundingan Oslo (1993), Perundingan Way River (1997), dan Perundingan Camp David (2000).

1.3 Ruang Lingkup

Penentuan ruang lingkup penelitian ini sangat penting bagi peneliti. Penentuan ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan ruang lingkup dilakukan supaya terfokus pada permasalahan

yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian melingkupi waktu (temporal), tempat (spasial) dan materi.

Segi waktu (temporal) penelitian dimulai tahun 1991-2002, tahun 1991 dijadikan batasan awal oleh peneliti karena pada waktu itu Konferensi Madrid 30-31 Oktober bisa dianggap sebagai awal pertemuan prospek perdamaian di Timur Tengah mulai terlihat ketika kedua belah pihak yaitu Israel dan Palestina setuju mengadakan pembicaraan, meskipun pada tahun 1970an telah di upayakan perdamaian oleh Amerika Serikat yang disebut juga perjanjian Camp David I akan tetapi perjanjian tersebut berhenti dan tidak ada kelanjutan lagi sampai pada tahun 1991 diadakan perjanjian Madrid. Tahun 2002 sebagai batasan akhir penulisan skripsi dengan pertimbangan pada tahun 2002 ketika diadakannya perjanjian Camp David II. Perjanjian Camp David membahas isu-isu utama mengenai status kota Jerusalem. Akan tetapi perundingan ini tidak mencapai kesepakatan, karena Israel menolak Masjid Al-Aqsa menjadi wilayah kedaulatan Palestina dan menolak resolusi PBB tentang hak kembali pengungsi Palestina (Wildana, 2009: 63-64). Pada dasarnya tahun 2002 setelah perjanjian Camp David II proses perdamaian Israel Palestina menemui jalan buntu, hal ini berhubungan dengan kota Jerusalem.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini adalah Israel dan Palestina. Fokus utama dalam penelitian ini adalah Peran Amerika dalam Perdamaian Israel dan Palestina, Amerika sebagai negara superpower memiliki kekuatan politik yang besar untuk mewujudkan perdamaian dalam konflik Israel Palestina. Melalui kekuatan politik tersebut Amerika dapat memaksa Israel dan Palestina untuk memasuki meja perundingan dan segera mewujudkan perdamaian antara kedua negara. Amerika mulai berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian antara Israel dan Palestina dengan memprakarsai diadakannya pertemuan Madrid 1991.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan dan ruang lingkup yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengapa Amerika melakukan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tahun 1991-2002?
- 2) Apa saja Upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam perdamaian Israel Palestina 1991-2002?
- 3) Mengapa Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam penyelesaian perdamaian Israel dan Palestina 1991-2002?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis lebih dalam latar belakang Amerika dalam Upaya perdamaian di Israel dan Palestina
- 2) Untuk mengkaji lebih dalam Upaya Amerika dalam perdamaian Israel Palestina
- 3) Untuk mengkaji lebih dalam hasil yang dicapai dalam penyelesaian Israel dan Palestina.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat mengetahui secara jelas mengenai latar belakang, upaya, dan hasil yang dicapai Amerika dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina;
- 2) Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 3) Bagi peneliti lain, sebagai motivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis sekaligus mengembangkannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengemukakan pendapat dari para ahli dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu akan diuraikan mengenai pendekatan dan teori. Berbagai kajian pendekatan dan teori-teori dari para ahli dan penelitian terdahulu dapat berupa karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, karya yang diterbitkan yaitu dalam bentuk buku-buku, karya yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian, skripsi, thesis, dan disertasi.

Buku karya Hermawati (2005:1-65) Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik dunia internasional yang terjadi lebih dari setengah abad. Konflik ini merupakan konflik terlama dan melibatkan banyak pihak negara Arab dan Barat. Buku ini menuliskan bahwasanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bermula ketika PBB mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1517 ketika Sultan Salim I berkuasa, wilayah Palestina dan Jerusalem jatuh ke tangan Turki Utsmani, namun pada saat Perang Dunia I yang pada saat itu Turki Utsmani kalah dalam Perang Dunia I maka LBB memberikan mandat Palestina kepada Kerajaan Inggris.

Fokus kajian dalam buku ini pada peperangan atau konflik yang terjadi antara kedua belah pihak, setelah mengalami berbagai hambatan untuk menjadikan kedua negara ini berdiri secara berdaulat maka pada tahun 1948 Israel yang di pimpin oleh Ben Gurion mengumumkan secara resmi berdirinya negara Israel, lalu setelah itu Amerika dan Uni Soviet menyatakan pengakuan terhadap negara Israel, tentu saja hal ini memunculkan berbagai reaksi dan pertentangan dari negara Arab. Maka dari itu dalam buku ini penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih mendalam seputar konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel, bukan hanya itu saja dalam buku ini juga menuliskan peperangan-peperangan yang terjadi di Timur Tengah, Israel yang menjadi aktor akan semua peperangan.

Selain itu dalam buku karya Hermawati ini juga menjelaskan tentang latar belakang pembentukan dan perjuangan PLO serta Hamas dan Pejuang Palestina. Dalam buku ini juga memaparkan peranan negara-negara Islam dalam

penyelesaian konflik Israel dalam Palestina, seperti peranan Arab Saudi dalam mewujudkan penyelesaian masalah yang terjadi di Palestina, Arab Saudi merasa ini merupakan misi dan tuntutan politik luar negerinya yang dirumuskan tahun 1943. Pada tahun itu Raja Ibnu Saud mengadakan pertemuan dengan para Ulama dan pembesar istana kerajaan yang membicarakan masalah mengenai Palestina. Arab Saudi menyatakan bahwa penyelesaian konflik ini dapat di tempuh dengan cara, Pertama Arab Saudi harus bersatu dengan negara Arab lainnya, kedua Arab Saudi melakukan pendekatan terhadap Amerika untuk menjadi mediator yang adil untuk menyelesaikan masalah konflik Israel dan Palestina

Buku karya Hermawati mengungkapkan fakta sejarah, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina adalah fenomena abad ke-20 yang sampai sekarang belum jelas kapan selesainya karena masing-masing pihak sama-sama Radikal dalam memperjuangkan tanah Air. Israel tidak mau mundur sejengkal pun dari batas-batas yang sudah direbutnya, bahkan Israel semakin memperkuat posisinya dengan membangun tembok pembatas antara Israel dan Palestina. Meskipun tembok ini di protes oleh komunitas internasional.

Hermawati hanya membahas mengenai sejarah agama dan bangsa Yahudi Palestina, serta sedikit membahas mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, dalam bab 6 buku ini membahas mengenai peran negara-negara Islam dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Karena buku ini hanya memfokuskan mengenai sejarah dan konflik yang ada di Israel dan Palestina saja. Sehingga peneliti mempunyai celah untuk mengkaji peran Amerika dalam proses perdamaian Israel dan Palestina karena penelitian yang akan dibahas tidak hanya difokuskan dalam masalah konflik dan sejarahnya saja.

Buku karya Kurniawan (2013, 69-117) dalam bukunya yang berjudul *Terorisme Negara Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamentalis*, dalam buku ini Kurniawan menjelaskan mengenai pendudukan Israel di Palestina sejak tahun 1967, ia juga menjelaskan bahwasanya meskipun pendudukan tersebut telah terjadi cukup lama namun Amerika sebagai negara adikuasa dan PBB sebagai lembaga Internasional dirasa kurang efektif dalam memeditasi dua negara

tersebut dan akibatnya timbul kegagalan-kegagalan dalam penyelesaian masalah tersebut. Penyebabnya adalah pemerintahan Palestina yang tidak legitimit, secara yuridis formal Palestina sebagai negara terdiri dari wilayah, penduduk, pemerintahan, dan hubungan luar negeri. Kurniawan juga menjelaskan mengenai pihak otoritas Israel yang telah mengusir ratusan ribu rakyat Palestina dari tanah kelahirannya sejak tahun 1948, selanjutnya penulis juga mengungkapkan alasan menarik yang perlu menjadi perhatian pembaca, sebagaimana yang tertulis dalam buku ini adalah mengapa Israel yang tindakan-tindakannya bertentangan dengan hukum Internasional tidak mudah dihentikan, malah akhir-akhir ini justru terkesan semakin meningkat frekuensinya. Dari kajian diatas penulis juga menyimpulkan beberapa catatan. Pertama, Israel dan Palestina adalah negara yang bertetangga yang akan terus berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, kenyataannya Palestina telah diakui sebagai negara yang sah namun tidak sekuat Israel. Bahkan dalam melakukan diplomasi dan berpolitik Palestina mempunyai kemampuan yang luar biasa. Pengakuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dan didukung oleh 137 negara tahun 2012 mampu menentang Israel, namun dengan tingginya daya tawar Amerika telah menaikkan posisi Israel terhindar dari pertanggungjawaban. Dalam buku Kuriawan ini masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, karena dalam buku ini hanya menyantumkan mengenai politik Palestina dan Israel, maka dari itu peneliti memiliki celah untuk membahas mengenai proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Karya buku Husein (1995, vii-188) yang berjudul *Prospek Perdamaian di Timur Tengah*, memaparkan bahwasanya hanya Amerika lah satu-satunya pihak yang dapat menjadi tumpuan proses perdamaian. Tetapi meskipun demikian Israel sebagai pihak yang bersengketa juga tampaknya tidak bersungguh-sungguh untuk berdamai, hal ini terlihat terlihat jelas dalam buku ini yang memaparkan mengenai masalah politik Tel Aviv yang buruk, dimana instalasi listrik di seluruh jalur Gaza dan Jericho dimatikan oleh pihak Israel. Seluruh pernyataan politik para pemimpin Israel juga tidak selalu bersahabat dengan rakyat Palestina, penindasan terhadap rakyat Palestina juga masih berlangsung, serta rangkaian teror Hebron. Israel tidak bersedia untuk membongkar pemukiman Yahudi di

daerah pendudukan, padahal hal inilah yang dianggap sebagai akar masalah yang terjadi, tanpa adanya ketersediaan untuk membongkar pemukiman yang berjumlah ratusan ribu. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwasanya Israel tidak bersungguh-sungguh untuk berdamai dengan Palestina.

Data mengenai sikap Amerika yang tidak seimbang juga sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina, dimana untuk membangun kembali administrasi dan keamanan kota Gaza dan Jericho memerlukan dana yang tidak sedikit, akan tetapi sampai Sekarang bantuan yang dijanjikan oleh pihak Amerika tak kunjung datang, padahal Arafat sedang berlomba dengan waktu untuk membuktikan bahwasanya usaha perdamiannya membawa hasil konkret. Sedangkan pihak Israel mendapat bantuan keuangan dari Amerika. Dalam buku Husein membahas mengenai sikap Amerika yang tidak seimbang dan wilayah Palestina di kuasai oleh Israel serta kedatangan imigran Yahudi dan pembangunan pemukiman Yahudi. Hal mengenai upaya AS untuk membujuk kedua belah pihak juga belum dicantumkan, jadi peneliti akan menyumbangkan penelitian lebih lanjut mengenai peranan Amerika dalam proses perdamaian Israel dan Palestina

Buku karya Sihbudi (1993, 42-119) yang berjudul *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, buku ini memaparkan mengenai masalah perundingan damai antara Israel dan Palestina. Di sini membahas bahwa perdamaian di Timur Tengah harus segera terwujud, akan tetapi pihak Palestina maupun Israel belum sepakat bagaimana prosesnya agar perdamaian ini dapat terwujud. Dalam Resolusi DK PBB no. 242 (1967) dan diperkuat oleh Resolusi no. 338 (1973), telah disepakati oleh sebagian negara bahwasanya wilayah Palestina, Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967 dikembalikan kepada Palestina untuk mencapai suatu perdamaian. Sebagai kompensasi nya negara-negara Arab mengakui keberadaan Israel dan hidup secara berdampingan dengan damai.

Data mengenai masalah pemukiman Yahudi di daerah pendudukan menjadi salah satu faktor penghambat nya proses perdamaian, Amerika menjadi satu-satunya kunci untuk mencapai perdamaian tersebut. Peran Amerika dalam proses perdamaian seperti sebuah permainan catur dimana Amerika sebagai

tangan yang memainkan permainan tersebut. Dalam hal ini Amerika menjalankan peran ganda dalam kebijaksanaannya di Timur Tengah. Amerika ingin menekankan meskipun menolak pendudukan Israel di Palestina akan tetapi dilain pihak Amerika selalu mendukung keputusan yang di ambil oleh Israel. Jika Amerika konsisten terhadap sikapnya ini maka seharusnya berusaha untuk menghentikan pembangunan pemukiman di daerah pendudukan Yahudi. Proses perdamaian akan sulit dilakukan jika Israel tetap bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan.

Sihbudi membahas mengenai wacana bahwasanya perundingan perdamaian harus segera terwujud, buku ini membahas mengenai wacana saja akan tetapi bagaimana proses perundingan tidak tercantum dalam buku Sihbudi. Jadi peneliti merasa memiliki ruang untuk membahas lebih lanjut mengenai proses perdamaian karena dalam penelitian yang akan dibahas tidak hanya memfokuskan mengenai perundingan-perundingan. Dimana dalam penelitian yang akan dibahas oleh peneliti akan dipaparkan mengenai jalannya perundingan dan hasil dari perundingan tersebut.

Skripsi karya Silaban yang berjudul "*Terdendat-Sendatnya Pemulihan Damai Antara Israel dan Palestina di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu*" yang ditulis oleh Silaban (2011), menjelaskan mengenai tidak berjalannya pemulihan damai yang dikarenakan perbedaan persepsi dan ketiadaan komitmen antara dua negara tersebut. Selain itu di sini juga membahas mengenai kepentingan kepentingan Israel yang bersifat religius, dalam hal ini masyarakat Yahudi terbagi menjadi dua masyarakat yaitu masyarakat pro perdamaian dan kontra terhadap perdamaian. Skripsi ini juga membahas mengenai persepsi Israel mengenai perundingan, pada saat ini Israel sendiri di pimpin oleh perdana menteri kedua Benjamin Netanyahu dihadapkan pada gagasan *two state solution* yang menjadi topik dalam perundingan perdamaian. Dimana negara Israel dengan jaminan keamanan yang telah di kondisikan akan hidup berdampingan dengan negara Palestina merdeka. Netanyahu sendiri bersedia melanjutkan perundingan damai dengan Palestina yang sempat vakum karena dibekukan oleh Mahmoud Abbas setelah penyerangan Israel terhadap Gaza dalam

operasi *Cast Lead*. Hal ini disampaikan oleh Netanyahu dalam pidatonya di AIPAC policy Conference, hal ini mencangkup: jalur politik yaitu berfokus pada perundingan damai tanpa syarat dan pendudukan, jalur keamanan, jalur ekonomi. Dalam skripsi ini juga memaparkan mengenai mantan Menlu Inggris Tony Blair mendukung tindakan Netanyahu dalam menghidupkan ekonomi Palestina yang sempat suram semenjak Intifalah kedua pada tahun 2002.

Skripsi yang dibahas oleh Sodik mengenai pemulihan perdamaian dibawah pemerintahan perdana menteri Netanyahu, sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah peranan Amerika dalam proses perdamaian Israel dan Palestina tahun 1991-2002.

Skripsi Sodik "*Hambatan Palestina dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh PBB Tahun 2011*". Sodik memaparkan mengenai hambatan hambatan yang di alami oleh Palestina ketika ingin mendapatkan Status keanggotaan penuh di PBB. PBB sebagai salah satu organisasi internasional memiliki mekanisme tersendiri dalam penerimaan anggota berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara anggota yang disahkan dalam piagam PBB. Organisasi penyedia saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya meritis akses komunikasi bersama dengan negara non anggota maupun Organisasi internasional lainnya. Paska deklarasi negara Palestina pada 15 November 1988, meskipun telah diakui oleh negara anggota OKI dan Liga Arab, Gerakan Non Blok dari asean akan tetapi PBB masih memposisikan Palestina sebagai entnitas non negara dengan di berikan nya status keanggotaan sebagai *non member obsever entity* sejak 1978 melalui resolusi Majelis Umum no. 3237. Keberadaan negara Palestina selama beberapa dekade masih dalam perdebatan, meskipun secara *de facto* maupun *de jure* telah diakui oleh banyak negara anggota PBB. Padahal, sangat perlu untuk mengetahui kejelasan mengenai status negara Palestina. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara yang merupakan subjek hukum Internasional.

Dalam penelitian Sodik lebih menekankan hambatan yang dialami oleh Palestina untuk memeperoleh status keanggotaan penuh di PBB, namun konflik yang berkepanjangan perlu mendapatkan perhatian oleh dunia internasional,

terutama PBB yang juga memiliki peran penting dalam persoalan Palestina dengan dikelurkannya keputusan-keputusan PBB dalam bentuk resolusi sebagai Upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Sedangkan skripsi yang akan dibahas peneliti lebih menekankan kepada peran Amerika dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina.

Pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan peran Amerika dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina dengan tujuan untuk mempermudah penulisan sejarah. Mengenai suatu peristiwa sejarah sangat tergantung pada pendekatan, dari segi mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang akan diungkapkan. Hasil pelukisan akan ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai penulis (Kartodirjo, 1992:4). Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis mengenai peran Amerika dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina dengan menggunakan pendekatan Internasional. Holsti mengungkapkan hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak. Pada dasarnya hubungan internasional adalah hubungan antar masyarakat dalam dunia dapat diwujudkan dengan bentuk interaksi oleh dua negara atau lebih. Adanya suatu kenyataan yang unik tentang politik internasional adalah bahwa negara sebagai aktor dipanggung internasional belum pernah jemu untuk melakukan peperangan (Rais, 1989:14). Interaksi antarnegara dalam sistem internasional sangat beragam sekali. Hubungan tersebut sering diklasifikasikan dalam lingkup masalah tertentu, seperti perdagangan dan sebagainya. Interaksi antarnegara juga diklasifikasikan pada jenis interaksi yang dominan yakni konflik dan kerjasama (Holsti, 1992:589). Penelitian ini akan menggunakan interaksi antarnegara berupa konflik dan kerjasama untuk menjelaskan permasalahan peran Amerika dalam perdamaian Israel dan Palestina.

Sedangkan Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam interaksi antarnegara Holsti mengemukakan ada enam bentuk penyelesaian konflik, salah satu penyelesaian konflik tersebut adalah penyelesaian melalui pihak ketiga. Proses perdamaian antara Israel dan Palestina adalah contoh penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Karena melibatkan Amerika sebagai pihak ketiga untuk

menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga memiliki tiga prosedur dasar sebagai berikut (1) perundingan bilateral antara negara yang terlibat konflik, (2) mediasi, (3) peradilan (Holsti, 1992:613). Peran Amerika dalam proses perdamaian Israel Palestina merupakan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga dengan prosedur mediasi.

Mediasi menjadi penting karena dalam konflik internasional komunikasi antar negara yang terlibat konflik biasanya menyempit, tindakan simbolis menggantikan pembicaraan secara nyata. Situasi tersebut menyebabkan fungsi pihak ketiga menjadi sangat penting karena berada di luar pengaruh emosional konflik. Pihak ketiga disini berperan untuk memperbaiki kembali komunikasi yang tersendat diantara pihak yang berkonflik (Holsti, 1992:623). Peran Amerika sebagai pihak mediator dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina sangat penting dan mempunyai peran yang vital, dimana Amerika sendiri tidak terlibat langsung dengan konflik kedua negara secara emosional. Amerika sebagai penyambung komunikasi kedua belah pihak berusaha menari Israel dan Palestina ke dalam meja perundingan.

Peran dan tugas mediator dalam penyelesaian konflik sangat rumit dan keikut campuran pihak ketiga dalam penyelesaian juga sangat beragam, mulai dari menyampaikan pihak yang bersengketa sampai memberikan tekanan kepada pihak yang bersengketa untuk menerima penyelesaian secara damai. Ada berbagai peran dan fungsi mediator dalam membantu menyelesaikan krisis atau konflik yang sedang berlangsung. Pertama peran yang dilakukan untuk membantu pihak yang bersengketa memulai atau melanjutkan perundingan bilateral dalam hal ini pihak ketiga tidak terlibat dalam perundingan yang penting. Posisi Amerika dalam hal perdamaian ini ketika memeperankan jasa baik, jasa baik yaitu menjadi pihak ketiga yang menjadi jalur komunikasi antara pihak yang bersengketa dalam menyampaikan pesan yang dikemukakan oleh Israel dan Palestina. Selanjutnya pihak ketiga atau Amerika dapat mengusulkan tempat untuk melaksanakan sidang diplomatik formal dan mendorong Israel dan Palestina untuk memulai pembicaraan resmi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan bidang studi keilmuannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, yang kemudian direkonstruksi dalam bentuk historiografi (Gottschalk, 1985:32). Data yang digunakan dalam penelitian ini seputar hal-hal yang terkait dengan peristiwa peran Amerika dalam Proses Perdamaian. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah ada empat tahapan yakni: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; (4) historiografi. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing tahapan tersebut

1. Heuristik

Tahap heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Heuristik yang dilakukan oleh penulis berupa kegiatan mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data, sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti (Sjamsuddin, 1996:67). Tahap heuristik dalam penelitian ini melakukan kegiatan untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dalam penulisan dan penelitian sejarah. Karena kajian yang akan dibahas adalah kajian pustaka, maka penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah berupa buku, laporan penelitian dan artikel yang terkait dengan Peran Amerika dalam “Proses Perdamaian Israel dan Palestina tahun 1991-2002”. Untuk mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, penulis memperolehnya dari beberapa perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan Kabupaten Jember Perpustakaan Pendidikan sejarah dan koleksi pribadi penulis. Maka peneliti berhasil menemukan sumber primer dan sumber sekunder.

Pada tahap heuristik ini peneliti tidak dapat menemukan sumber primer berupa buku, sumber primer yang diperoleh penulis adalah sumber-sumber yang

berkaitan dengan, Resolusi PBB dan dekalasi Balfour. Sumber sekunder yang diperoleh berupa buku yang membahas tentang tema penelitian yang ditulis oleh orang yang tidak hadir dalam peristiwa sejarah tersebut. Serta data-data yang masih berkaitan dengan fokus penelitian, sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain: buku *“Prospek Perdamaian di Timur Tengah”* karya Husein (1995), *“Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme”* karya Katz dkk (1996), *“Jerusalem”* karya Kuncahyono (2008), *“Terorisme Negara Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamentalisme”* karya Kurniawan (2013), *“Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah”* karya Sihbudi (1993), *“Profil Negara-Negara Timur Tengah”* karya Sihbudi (1995), *“Jejak-Jejak Juang Palestina dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa”* karya Rahman (2002), *“Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia”* karya Lenczowski (1992), *“Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah”* karya Rais 1992, *“Hubungan Internasional di Timur Tengah Pasca Perang Teluk”* karya Habibullah 1994, *“Prospek Perdamaian Timur Tengah Pasca Benyamin Netanyahu”*, karya Habibullah.

Sumber-sumber tersebut didapatkan oleh peneliti dari laboratorium Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Sastra Universitas Jember, perpustakaan HI Universitas Jember, internet, kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jember, serta koleksi pribadi.

2. Kritik

Setelah sumber sejarah dikumpulkan tahap berikutnya melakukan kritik dan verifikasi terhadap sumber yang diperoleh, tujuannya adalah untuk memperoleh keabsahan tentang keaslian sumber (Abdurrahman, 2007:68).

Sumber yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diuji melalui kritik, baik kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan keaslian sumber, selain itu kritik ekstern digunakan agar peneliti terhindar dari dokumen atau buku palsu. Peneliti melakukan kritik ekstern buku karya Amien Rais dengan cara mengecek melihat keaslian sumber dengan melihat sampul, tahun terbit, judul pengarang apakah sumber yang didapat benar benar asli dengan membandingkan buku yang sama

yang berada diluar, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kritik intern, disini peneulis melakukan kritik interen dengan cara kritik interen dilakukan dengan cara peneliti menganalisis isi atau substansi dari sumber yang digunakan. Dalam proses ini peneliti menguji apakah sumber yang digunakan benar dan dapat dipercaya atau tidak. Peneliti melakukan kritik interne dengan cara membandingkan isi buku dengan sumber-sumber yang relevan dan melihat apakah ada perbedaan atau tidak, setelah tidak ada perbedaan maka sumber yang digunakan dianggap kredibel yang selanjutnya disebut dengan fakta sejarah

3. Interpretasi

Tahap ketiga yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu tahap interprestasi, interprestasi sering juga disebut dengan analisis sejarah. Fakta sejarah yang diperoleh dari tahapan kritik sumber selanjutnya di rekontruksi dengan cara diinterpretasi atau ditafsirkan. penulis pada tahap ini melakukan Penafsiran dilakukan guna untuk memahami teks-teks yang terdapat dalam sumber, sehingga dapat dijelaskan dan digambarkan melalui tulisan. Dalam hal ini ada dua metode yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1995:100). Peneliti melakukan interprestasi terhadap fakta-fakta yang ada menjadi sebuah cerita yang sistematis dan menarik. Peneliti menghubungkan fakta-fakta yang ada dalam buku mengenai peristiwa peran Amerika dalam Upaya perdamaian Israel dan Palestina menjadi suatu cerita yang sistematis dan menarik dan logis, sehingga diperoleh cerita sejarah yang kronologis.

4. Historiografi

Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan dan pemaparan atau pelaporan, penelitian hasil sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian awal dan akhir (Abdurrahman, 2007:76). Historiografi yang dilakukan oleh penulis merupakan penyajian atau penggambaran peristiwa

sejarah yang telah diinterpretasikan oleh sejarawan secara tertulis. Penyajian ini menghasilkan peristiwa sejarah, namun penggambaran peristiwa sejarah ini tidak bisa utuh karena pada tahap ini peneliti diharapkan menggunakan imajinasi, karena sejarawan harus bisa menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam sejarah, dan apa yang terjadi setelah peristiwa sejarah berlangsung (Kuntowijoyo, 20013:52).

Proses penulisan sejarah, daya imajinasi, dan kreatifitas harus tetap terikat pada fakta sejarah, dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Sejarawan harus menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa lampau tanpa diberi tambahan maupun rekayasa (Gottschalk, 1975:32).

Pada langkah terakhir ini, peneliti menyusun hasil dari rekontruksi atau interpretasi menjadi sebuah cerita sejarah yang kronologis, sistematis dan menarik dalam bentuk karya skripsi yang terdiri dari tujuh bab. Bab I berisi pendahuluan berisikan latar belakang yang memaparkan alasan pemilihan judul Skripsi "*Peranan Amerika dalam Upaya Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002*", penegasan judul untuk menghindari makna ganda dalam penafsiran dan memahami judul serta isi skripsi, ruang lingkup penelitian sebagai fokus pembahasan atau batasan skripsi, rumusan masalah yang akan dikaji peneliti dalam pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II berisikan Tinjauan pustaka menguraikan tentang review buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, terdapat pula mengenai pemaparan tentang pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti ini dan teori yang digunakan. Bab III metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Bab IV berisikan menjelaskan, menganalisa, dan memaparkan latar belakang upaya Amerika dalam Perdamaian Israel dan Palestina, . Latar belakang berisikan 2 sub bahasan pertama kepentingan nasional Amerika dalam hal kepentingan Nasional Amerika disini adalah alasan mengapa Amerika merasa perlu untuk mendamaikan kedua belah pihak, Israel sebagai negara yang paling dekat dengan Amerika dalam hal ini dekat hubungan bilaterlah dan lain lain, sub bahasan kedua berisikan Kemenangan

Amerika dalam perang teluk II disini penulis akan memaparkan alasan-alasan mengapa Amerika mau dan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, salah satu faktornya adalah pada saat perang Teluk II (Kuwait dan Irak) berakhir Amerika yang pada saat itu memberikan peranan yang besar terhadap Berakhirnya Perang Teluk II pada saat ini lah Amerika merasa menjadi Polisi dunia dan menjadi juru selamat di Timur Tengah. Bab V berisi tentang upaya yang dilakukan Amerika dalam perdamaian, bab V terdiri dari 2 sub bahasan, pertama Menarik Israel dan Palestina ke meja perundingan, di sini akan dipaparkan upaya Amerika dalam mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dalam meja perundingan. Kedua, strategi Amerika Serikat dalam upaya perundingan, disini akan dipaparkan bagaimana pihak Amerika Serikat sebagai pihak mediator mampu menarik Israel dan Palestina ke dalam meja perundingan. Selanjutnya pada Bab VI mengenai sub hasil akhir yang dicapai dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Bab VII berisi 1 sub bahasan yang mencakup 2 bahasan lain, pertama hasil yang dicapai adalah kegagalan proses perdamaian, dimana hasil ini adalah, pertama penolakan dari Yasser Arafat disini akan dipaparkan mengenai penolakan Yasser Arafat, kedua perubahan politik di Israel gagalnya proses perdamaian antara Israel dan Palestina juga terjadi karena perubahan politik yang terjadi di Israel, antara partai buruh dan Likud, mengenai masalah Jerusalem, mengenai Jerusalem ini merupakan masalah yang tak kunjung selesai, ketika perjanjian damai hampir berhasil dan mendiskusikan mengenai Jerusalem maka kedua belah pihak yaitu Israel dan Palestina sama-sama bersikukuh bahwa Jerusalem sebagai kota yang diklaim antar kedua negara tersebut tidak dapat di ganggu gugat. Bab VIII penutup yang berisi kesimpulan serta saran.

BAB 5. UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM PROSES PERDAMAIAN ISRAEL PALESTINA TAHUN 1991-2002

Berakhirnya perang dingin serta perang teluk II menjadikan Amerika Serikat sebagai negara superpower baru di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam percaturan politik internasional. Dengan kekuasaan politik yang besar, Amerika Serikat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan untuk membangun negara Amerika menjadi lebih maju. Salah satu agenda Amerika untuk membangun negara Amerika adalah dengan mengamankan suplai minyak dari Timur Tengah. Akan tetapi ternyata hal itu terkendala dengan kenyataan bahwa Timur Tengah sedang kacau karena adanya konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan Amerika akan minyak, Amerika harus segera membuat keadaan damai di Timur Tengah. Amerika beranggapan bahwa perdamaian di wilayah Timur Tengah hanya akan tercapai jika konflik antara Israel dan Palestina dapat diselesaikan. Oleh karena hal tersebut Amerika Serikat melibatkan diri dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu Amerika Serikat juga memiliki agenda nasional yang harus dilaksanakan, dalam bab ini akan dibahas bagaimana upaya Amerika Serikat untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

5.1. Strategi Amerika Serikat menarik Israel dan Palestina ke Meja Perundingan Tahun 1991-2002

Amerika Serikat dalam upayanya untuk mengamankan wilayah Teluk, pertama menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi antara Israel dan Palestina (Rais, 1993:6). Keamanan wilayah teluk tidak akan tercapai jika konflik antara Palestina dan Israel tidak segera ditangani. Konflik ini seperti bara api dalam perdamaian wilayah Timur Tengah, jika tidak segera ditangani akan semakin besar dan bisa melibatkan beberapa negara di kawasan tersebut. Oleh karena itulah, untuk mengatur kembali keamanan Timur Tengah Amerika Serikat harus segera mendamaikan konflik antara Israel dan Palestina. Konflik kedua negara ini memang sangat berpengaruh bagi kedamaian di Timur Tengah. Penyelesaian

konflik Israel Palestina merupakan kunci pokok bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Sesudah perang Teluk berakhir Amerika Serikat berpendapat bahwa tidak ada saat yang paling tepat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Amerika Serikat menggunakan semua kekuatannya di Teluk, kedekatan dengan negara Arab, Israel dan meyakinkan negara yang bertikai untuk yang penting datang. Semua langkah ini berhasil dan mampu membawa negara-negara yang bertikai masuk ke meja perundingan. Selain itu kedua negara yang berkonflik sekarang juga sudah pada akhirnya pihak-pihak yang berkonflik sudah menyadari bahwa, dengan terus melakukan konflik maka masing-masing pihak akan mengalami kerugian yang sangat besar, kedua belah pihak akan saling terluka, bahkan, bukan tidak mungkin pihak lain yang justru mendapatkan keuntungan selama berlangsungnya konflik. Jika konflik dalam kondisi seperti ini, inilah saat yang paling tepat untuk melakukan proses negosiasi. Kesadaran seperti inilah kemudian membawa Israel dan Palestina maju ke meja perundingan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1991.

Langkah pertama yang dilaksanakan Amerika Serikat untuk menyelenggarakan konferensi Madrid dimulai Pada tanggal 22 Mei 1989. Sekretaris Negara AS James Baker telah memberi tahu pada peserta AIPAC, bahwa Israel harus meninggalkan kebijakan ekspansionisnya; Pernyataan ini bagi banyak orang dianggap sebagai sinyal bahwa masa presiden Reagan yang memihak Israel telah berakhir. Setelah Perang Teluk pada tanggal 6 Maret 1991, Presiden George HW Bush berbicara kepada Kongres dalam sebuah pidato yang sering disebut-sebut sebagai pernyataan kebijakan utama pemerintah Bush mengenai tatanan baru di Timur Tengah setelah pengusiran pasukan Irak dari Kuwait. Selain mempertahankan kehadiran angkatan laut AS secara permanen di Teluk, memberikan dana untuk pembangunan Timur Tengah, dan melembagakan perlindungan terhadap penyebaran senjata, "Inti dari programnya Bush tersebut, bagaimanapun, adalah untuk mencapai sebuah perjanjian Arab-Israel berdasarkan prinsip teritori untuk perdamaian dan pemenuhan hak-hak Palestina" (Rockefeller Center,2015:16).

Sebagai langkah awal, Bush mengumumkan niatnya untuk mengadakan kembali konferensi perdamaian Internasional di Madrid. Pemerintahan Bush percaya bahwa ada kesempatan untuk menggunakan kekuatan politik Amerika Serikat yang dihasilkan oleh kemenangan AS dalam Perang Teluk untuk merevitalisasi proses perdamaian Arab-Israel. Inisiatif perdamaian ini berfokus untuk mengadakan konferensi internasional multi partai yang kemudian masuk ke jalur negosiasi bilateral dan multilateral yang terpisah. Menteri Luar Negeri AS James Baker melakukan delapan kunjungan diplomatik ke wilayah yang bertikai untuk mendapat dukungan dalam konferensi tersebut. Sebuah kerangka tujuan dirumuskan oleh AS bersama dengan Uni Soviet, diteruskan dengan sebuah surat undangan, tertanggal 30 Oktober 1991 kepada Israel, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina (Wikipedia: Israeli Palestine Peace Proses diakses 30 September 2017).

Amerika Serikat juga melakukan hal lain untuk menekan Israel agar mau menghadiri konferensi Madrid. Israel yang sebelumnya mempunyai sebuah program pemukiman Yahudi yang dinamakan “program seratus ribu” sekarang merasa kekurangan dana untuk memenuhi program tersebut. Akibat banyak pengungsi Yahudi dari Uni Soviet, uang yang dipersiapkan Israel senilai 3 miliar dolar untuk menyediakan perumahan dan pekerjaan dirasa kurang. Jumlah 3 miliar dola untuk rencana seratus ribu dianggap tidak cukup lagi. Maka Israel dianggap perlu untuk menghubungi Amerika Serikat. Israel pun meminta pinjaman senilai 10 miliar dolar kepada pemerintah Amerika Serikat. Tetapi Israel tidak mudah untuk mendapat apa yang diinginkannya. Presiden AS George Bush kurang menanggapi permintaan Israel. Bahkan Bush berhasil memperoleh dukungan kongres AS untuk menunda pembahasan permintaan jaminan pinjaman itu. Penundaan ini dimaksudkan AS untuk memberikan tekanan kepada Israel agar turut hadir dalam konferensi Madrid, akhir Oktober 1991 (Shihbudi, 1993:56).

Proses perundingan memang sudah dimulai di Madrid pada 30 Oktober 1991 dan dilanjutkan di Washington pada Desember, dan secara teoritis akan terus dilanjutkan apapun hasil perundingan tersebut. Ada yang menarik dan sekaligus mengherankan dalam konferensi perdamaian antara Israel dengan Lebanon,

Syiria, Jordan dan Palestina di lain pihak. Bahwa negara-negara yang berseteru dengan tegang tersebut bersedia datang ke meja perundingan dengan bujukan dan tekanan dari Amerika Serikat, yang merupakan mediator. Sedangkan yang mengherankan adalah mereka mau ikut serta dalam konferensi tersebut tanpa adanya syarat apapun, pokoknya bertemu dulu, hasilnya apa kata nanti. Mungkin negara yang bertikai tersebut sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk menyelesaikan konflik, sehingga mereka menganggap bahwa ajakan Amerika Serikat untuk merundingkan perdamaian adalah sesuatu yang paling baik bagi negara-negara yang bertikai tersebut (Rais,1993:7). Negara-negara yang bertikai juga tidak menolak dikarenakan dengan kedekatannya sekarang dengan Amerika hal ini membuat mereka sedikit yakin bahwa perdamaian yang tercapai akan adil bagi semua pihak. Selain itu juga ada kekuatan militer Amerika yang ada di wilayah teluk itu juga setidaknya membuat negara-negara teluk gentar dan mau ikut berunding.

Bersamaan dengan waktu perundingan Arab-Israel di Washington, 24 februari 1992. Permintaan jaminan pinjaman Israel sebesar 10 miliar dolar dibahas dalam kongres AS. Menteri luar negeri AS. James baker di depan kongres menegaskan bahwa AS akan memberikan jaminan pinjaman 10 miliar dolar kepada Israel, Jika Israel mau membekukan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan, termasuk rumah-rumah yang sedang dalam tahap pembangunan (Rais, 1993: 46)

Pemukiman Yahudi tersebut akan mengganjal proses perdamaian yang sedang berlangsung. Selama ini Israel selalu menolak masalah pemukiman sebagai syarat perundingan perdamaian. Israel baru mau membicarakan masalah pemukiman Yahudi setelah tiga tahun, setelah status akhir daerah pendudukan sudah ditentukan. Sementara itu pihak Palestina menghedaki sebaliknya, bahwa pemukiman Yahudi di daerah pendudukan harus segera dihentikan, sebelum pembicaraan status daerah tersebut. Juru bicara delegasi Palestina, Hanan Ashrawi mengatakan “selama pemukiman terus berlangsung, selama bulldoser-bulldoser meratakan tanah kami, jelas bahwa Israel menggali kuburan bagi proses perdamaian.”

Konferensi Madrid menghasilkan sedikit kemajuan nyata menuju perdamaian. Namun, konferensi tersebut berhasil memecahkan tabu diskusi terbuka antara Israel dan negara-negara Arab. Selain itu, pertemuan tersebut menunjukkan sebuah komitmen di antara para pihak yang sedang bersengketa dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Sementara Amerika Serikat tidak melakukan peran mediator proaktif, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mengadakan konferensi dan menghasilkan pencapaian simbolisnya. Secara keseluruhan, pencapaian ini berasal dari kepemimpinan Presiden Bush dan Sekretaris Baker yang tegas.

Setelah berakhirnya Konferensi Madrid, sekretaris Negara Clinton, Christopher memediasi pembicaraan yang sedang berlangsung antara perwakilan Israel dan Palestina di Washington. Konferensi Madrid membuka peluang terhadap dilaksanakannya proses negosiasi selanjutnya, terlihat dengan adanya kesepakatan dari pihak Palestina dan Israel untuk kembali melakukan negosiasi langsung, dengan mengirimkan delegasi masing-masing untuk bertemu di salah satu kota kecil Norwegia.

Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin juga mengizinkan negosiator Israel untuk bertemu dengan delegasi yang bertindak atas nama Ketua PLO Yaser Arafat di Norwegia. Dengan berhentinya perundingan Washington, Rabin akhirnya memilih Oslo sebagai saluran perundingan resmi. Di bawah pengawasan mediator Norwegia, Rabin dan Arafat tiba pada sebuah deklarasi saling pengakuan dan menghasilkan Kesepakatan Oslo. Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton bertindak sebagai saksi dalam momentum bersejarah tersebut. Meskipun Amerika Serikat pada umumnya diberitahu hasil dari perundingan, Clinton menyatakan sedikit minat untuk terlibat dalam perundingan damai itu secara signifikan (Rocfeller Center, 2015:17). Konferensi Oslo ini sedikit berbeda dengan konferensi sebelumnya, dimana peran Amerika Serikat hanya sebagai saksi. Pihak Israel dan Palestina mau datang dan berunding tanpa paksaan dan tuntutan-tuntutan sebelumnya, hal ini terjadi karena kedua belah pihak merasa konferensi ini lanjutan dari perjanjian Madrid dan Wasington.

Selanjutnya dalam perundingan Wye River merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Setelah mengalami kebuntuan dalam proses perdamaian, Clinton berusaha untuk melibatkan kembali pihak-pihak yang bertikai tersebut dengan mengundang Netanyahu dan Arafat ke Perkebunan Sungai Wye di Maryland untuk melanjutkan pembicaraan. Sebagai kembalinya diplomasi puncak Presiden Carter yang telah menghasilkan kesuksesan di jalur Israel-Mesir, Clinton dan para penasihatnya terlibat dalam mediasi balik dan terus-menerus untuk membantu para pihak mencapai kompromi.⁴⁸ Ini kembali ke gaya yang lebih tradisional dari diplomasi formal menghasilkan beberapa tingkat kemajuan. Sementara Arafat setuju untuk mendukung keamanan dan mencabut bagian piagam PLO yang mempertanyakan hak Israel untuk ada, Israel berjanji untuk mundur dari daerah Palestina dan lebih jauh akan membebaskan tahanan orang Palestina. Masalah muncul terutama dalam proses implementasi; Pemerintah sayap kanan Netanyahu menolak untuk melakukan penarikan, dengan mengklaim bahwa orang-orang Palestina tidak mematuhi keamanan. Jenis kemunduran ini menggambarkan efek kecenderungan politik para pemimpin kontemporer terhadap dinamika pelaksanaan. Dalam hal ini, penolakan Netanyahu terhadap persyaratan Oslo menginformasikan keengganannya untuk memberlakukan tindakan perdamaian seperti yang direncanakan (Rocfeller Center, 2015:18-19).

Pada akhir masa jabatannya yang kedua, Clinton merancang sebuah usaha terakhir untuk mendorong para pihak yang bertikai tersebut untuk menuju penyelesaian konklusif melalui diplomasi KTT tradisional. Pada bulan juni 2000 Bill Clinton mengutus Madeleine Albright ke Timur Tengah untuk menemui Perdana Menteri Ehud Barak dan Presiden Palestina guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Mengundang Arafat dan Perdana Menteri baru Barak Israel ke Camp David untuk memperdebatkan isu-isu yang diperebatkan mengenai perbatasan, keamanan, permukiman, dan hak untuk

kembali. Sementara Clinton mengajukan proposal berkaitan dengan perbatasan kedua pihak dan penarikan pemukiman Israel yang tampaknya sesuai untuk kedua belah pihak, mereka akhirnya tidak dapat mengatasi jalan buntu yang tak terkendali di Jerusalem. Yaser Arafat mencari kedaulatan Palestina atas seluruh Jerusalem Timur, namun Barak tetap tidak mau menyerahkan wilayah-wilayah tertentu. Meski Clinton mencoba mengembangkan solusi kreatif seperti menetapkan "kedaulatan terbatas" Palestina atas lingkungan dalam. Namun, Arafat akhirnya menolak tawaran terakhir, dengan menyatakan, "Jika saya menandatangani kesepakatan ini, saya akan terbunuh." Mengikuti kegagalan perundingan tersebut, Clinton dan beberapa penasihatnya menyalahkan pihak Arafat. Apakah Arafat semata-mata untuk disalahkan tetap diperdebatkan (Kuncahyono,2012:277-278).

Jadi strategi Amerika Serikat untuk menarik kedua belah pihak yang bertikai agar mau menghadiri perjanjian dengan cara. Tahun 1991 Bush melakukan delapan kunjungan diplomatik ke wilayah yang bertikai untuk mendapat dukungan dalam konferensi tersebut. Sebuah kerangka tujuan dirumuskan oleh AS bersama dengan Uni Soviet, diteruskan dengan sebuah surat undangan, tertanggal 30 Oktober 1991 kepada Israel, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Amerika Serikat juga melakukan hal lain untuk menekan Israel agar mau menghadiri konferensi Madrid. Israel yang sebelumnya mempunyai sebuah program pemukiman Yahudi yang dinamakan "program seratus ribu" sekarang merasa kekurangan dana untuk memenuhi program tersebut. Akibat banyak pengungsi Yahudi dari Uni Soviet, uang yang dipersiapkan Israel senilai 3 miliar dolar untuk menyediakan perumahan dan pekerjaan dirasa kurang. Jumlah 3 miliar dola untuk rencana seratus ribu dianggap tidak cukup lagi. Maka Israel dianggap perlu untuk menghubungi Amerika Serikat. Israel pun meminta pinjaman senilai 10 miliar dolar kepada pemerintah Amerika, dan juga AS melakukan tekanan-tekanan terhadap pihak Palestina yaitu menakut-nakuti bahwasanya jika Palestina tidak ikut andil dalam proses perdamaian ini maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak Palestina.

Tahun 1993 Setelah berakhirnya Konferensi Madrid, sekretaris Negara Clinton, Christopher memediasi pembicaraan yang sedang berlangsung antara perwakilan Israel dan Palestina di Washington. Untuk menarik agar Yaser Arafat mau berunding Christopher memberikan jaminan yang di ajukan oleh Yaser Arafat yaitu: pertama, mengumpulkan kembali 5000 keluarga Palestina yang bercerai-berai diluar wilayah pendudukan. Kedua, membatalkan pengusiran 10.000 rumah warga Palestina di wilayah pendudukan. Ketiga, mengizinkan bantuan asing bagi warga Palestina di wilayah pendudukan dan bebas campur tangan dari Israel. Keempat, mengembalikan warga Palestina yang diusir pada tahun 1967-1984. Kelima, segera memulangkan sekitar 400 warga Palestina yang diusir ke Lebanon Selatan. Konferensi Madrid membuka peluang terhadap dilaksanakannya proses negosiasi selanjutnya, terlihat dengan adanya kesepakatan dari pihak Palestina dan Israel untuk kembali melakukan negosiasi langsung, dengan mengirimkan delegasi masing-masing untuk bertemu di salah satu kota kecil Norwegia. Konfrenesi Oslo Isarel dan Palestina tidak mendapatkan tekanan atau bujukan seperti dalam Konfrenesi Madrid 1991, karena Konfrenesi Oslo merupakan lanjutan dari Madrid.

Selanjutnya dalam perundingan Wye River merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Setelah mengalami kebuntuan dalam proses perdamaian, Clinton berusaha untuk melibatkan kembali pihak-pihak yang bertikai tersebut dengan mengundang Netanyahu dan Arafat ke Perkebunan Sungai Wye di Maryland untuk melanjutkan pembicaraan. Sebagai kembalinya diplomasi puncak Presiden Carter yang telah menghasilkan kesuksesan di jalur Israel-Mesir, Clinton dan para penasihatnya terlibat dalam mediasi balik dan terus-menerus untuk membantu para pihak mencapai kompromi.

Juni 2000 Bill Clinton mengutus Madeleine Albright ke Timur Tengahh untuk menemui Perdana Menteri Ehud Barak dan Presiden Palestina guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Mengundang Arafat

dan Perdana Menteri baru Barak Israel ke Camp David untuk memperdebatkan isu-isu yang diperebatkan mengenai perbatasan, keamanan, permukiman, dan hak untuk kembali. Sementara Clinton mengajukan proposal berkaitan dengan perbatasan kedua pihak dan penarikan permukiman Israel yang tampaknya sesuai untuk kedua belah pihak, mereka akhirnya tidak dapat mengatasi jalan buntu yang tak terkendali di Jerusalem. Usaha AS pada perjanjian-perjanjian Oslo (1991), Wye River (1997), dan Camp David II (2002) merupakan usaha lanjutan dari Madrid (1991) dalam usahanya untuk menarik kedua belah pihak menggunakan strategi seperti pemberian dana kepada Israel, tekanan-tekanan kepada Israel Palestina.

5.2. Langkah Amerika Serikat dalam Perundingan Damai Israel dan Palestina Tahun 1991-2002

Terlepas dari segala kekerasan yang sedang berlangsung, para pemimpin Israel dan Palestina telah melakukan beberapa tindakan serius sebagai upaya untuk melakukan negosiasi guna menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dengan pergantian kepemimpinan secara berulang di kedua belah pihak, pendekatan untuk merundingkan perdamaian oleh kedua belah pihak dilakukan secara diam-diam. Perundingan secara diam-diam tersebut memprakarsai terjadinya kesepakatan Oslo yang terus berlanjut sampai pertemuan tingkat tinggi di Camp David di bawah pengawasan Presiden Clinton. Meskipun tidak satu pun dari proses perdamaian sebelumnya menghasilkan penyelesaian yang meyakinkan, setiap upaya memberi pelajaran penting berkenaan dengan bagaimana sikap pemerintahan yang berkuasa di Israel dan Palestina, serta seberapa jauh Amerika Serikat terlibat dalam perundingan tersebut (Rocfeller Center, 2015:17). Pihak penguasa dari Israel dan Palestina memiliki kepentingan sendiri. Di Israel jika partai buruh yang berkuasa maka sikap Israel akan lebih lunak namun jika partai Likud yang berkuasa maka sikap Israel akan keras. Hal itu juga berlaku bagi Palestina, delegasi Palestina merupakan wakil dari rakyat sehingga harus memperhitungkan apa kemauan rakyat Palestina. Dikarenakan

faktor yang mengikat kedua belah pihak ini perdamaian sedikit sulit tercapai, delegasi kedua belah pihak menginginkan rakyat mereka nantinya akan puas akan hasil perundingan.

Perundingan-perundingan yang berakhir dengan kegagalan tersebut peran Amerika Serikat seperti sangat sedikit. Amerika Serikat sepertinya juga lebih memihak terhadap Israel, sehingga perundingan-perundingan tersebut berakhir dengan kegagalan.

5.2.1. Konferensi Madrid 1991

Konferensi Madrid memberi nilai lebih dalam arti simbolisnya daripada substansi sebenarnya dari hasil perundingan yang dicapai, yang menghasilkan sedikit kemajuan nyata menuju perdamaian. Konferensi tersebut tidak mendekati topik pembentukan dasar teritorial untuk perdamaian Israel-Palestina, yang merupakan hakikat kerangka kerja untuk kemajuan di masa depan. Namun, konferensi tersebut berhasil memecahkan tabu diskusi terbuka antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Selain itu, pertemuan tersebut menunjukkan sebuah komitmen di antara para pihak yang sedang bersengketa dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Sementara Amerika Serikat tidak melakukan peran mediator proaktif, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mengadakan konferensi dan menghasilkan pencapaian simbolisnya. Secara keseluruhan, pencapaian ini berasal dari kepemimpinan Presiden Bush dan Sekretaris Baker yang tegas.

Pada tanggal 31 Oktober tahun 1991, Konferensi Madrid dilaksanakan menjadi langkah awal penanganan konflik ini dilakukan secara serius. Proses negosiasi ini dilakukan secara terbuka, namun dalam proses tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mengganjal, maka pembicaraan berhenti pada tanggal 3 November tanpa hasil (Sihbudi, Basyar, Zulkarnaen, 1993:42).

Selanjutnya Amerika Serikat mengundang peserta konferensi untuk berunding di Washington pada tanggal 4 November. Delegasi negara-negara Arab yang terdiri dari Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon sudah memenuhi undangan tersebut, tetapi tidak dari pihak Israel yang menolak perundingan

tersebut, dan memindahkannya pada tanggal 9 Desember 1991. Tawaran tanggal perundingan dari Israel ini kemudian ditolak oleh pihak Palestina, karena pada saat itu bertepatan dengan peringatan 4 tahun munculnya Intifadah. Tanggal 10 Desember kemudian disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengadakan pembicaraan, namun pertemuan tersebut pun gagal membicarakan hal-hal yang prinsipil (Sihbudi, Basyar, Zulkarnaen, 1993:42).

Semua pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut, sepakat untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, akan tetapi mereka belum sepakat bagaimana memulai membicarakan perdamaian. Pada pembicaraan tersebut, Suriah menginginkan Israel menarik pasukannya dari daerah pendudukan, sebelum adanya pembicaraan perdamaian secara menyeluruh. Delegasi Palestina ingin mandiri, terpisah dari Yordania ketika berunding dengan Israel. Delegasi ini juga menginginkan pembicaraan langsung pada masalah yang dianggap substansial, seperti pemukiman Yahudi di daerah Pendudukan atau bercokolnya pasukan Israel di sana, mengingat ini adalah inti pertikaian antara Israel dan Palestina.

Pihak Israel tetap mempertahankan pendiriannya bahwa, penarikan pasukan di daerah pendudukan tidak bisa menjadi dasar prasyarat pembicaraan perdamaian, dan delegasi Palestina harus tetap bergabung dengan Yordania. Memang masalah substansial yang ingin dibicarakan oleh pihak Palestina tidak ingin dibahas oleh Israel. dalam hal ini, Israel tidak akan mau berdialog jika perundingan mengarah pada pembentukan Negara Palestina Merdeka dengan wilayah Tepi Barat, Sungai Yordan, dan Jalur Gaza. Meskipun mereka mempunyai syarat untuk melanjutkan pembicaraan damai secara menyeluruh, tetapi mereka masih menginginkan adanya perundingan yang mengarah pada perdamaian abadi di Timur-Tengah. Hal yang perlu diperhatikan pada Konferensi Madrid tersebut adalah keberhasilan dalam pelaksanaan perundingan bilateral antara Israel dan Palestina, dalam artian untuk pertama kali mereka duduk bersama dan bernegosiasi secara langsung.

5.2.2. Perjanjian Oslo 1993

Persetujuan Oslo merupakan salah satu langkah paling penting dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Untuk pertama kalinya, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina dan menerapkan langkah-langkah untuk mengalihkan PLO ke wilayah yurisdiksi Gaza dan sebagian Tepi Barat (Kuncahyono,2010:276). Secara implisit, pemindahan tersebut akan memberi orang-orang Palestina sebuah basis teritorial kecil untuk mulai membangun negara Palestina, walaupun hasil perjanjian tersebut tidak secara khusus mengakui hak orang Palestina untuk merdeka. Setelah masa transisi lima tahun, para pihak harus mengadakan negosiasi lagi untuk kembali merundingkan mengenai isu-isu perbatasan, keamanan, Jerusalem, dan hak pengembalian pengungsi Palestina (lihat lampiran 1.2).

Sementara kemajuan yang diraih di Oslo melukiskan gambaran yang bagus untuk hubungan masa depan antara Palesina dan Israel, kesepakatan tersebut pada akhirnya gagal dilaksanakan karena para pihak yang bersengketa berjuang mengedepankan kepentingan masing-masing. Teks Perjanjian mencakup terlalu banyak generalitas yang dapat diinterpretasikan oleh para pihak secara ambigu saat mereka merumuskan persyaratan pelaksanaan, yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang signifikan. Selain itu, kesepakatan tersebut gagal menangani masalah yang paling diperdebatkan yang secara mendasar menentukan konflik, dengan anggapan anggapan bahwa pihak-pihak tersebut akan menyelesaikannya secara bertahap dalam perundingan intern. Keengganan para pihak untuk menghadapi kontroversi yang mengakar ini membatasi sejauh mana perundingan dapat terlaksana (Habibulah,1997:7-9).

Dalam pertemuan Oslo, Palestina membawa naskah dengan konsep kewilayahan Palestina yang ingin menguasai seluruh Jalur Gaza dan Tepi Barat, sementara pihak Israel menginginkan pengakuan PLO atas eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Proses negosiasi tersebut berjalan sebanyak dua belas sesi selama delapan bulan. Israel diwakili oleh DR. Yair Hirschfeld dan Dr. Ron Pundak. Keduanya adalah akademisi Israel, sementara dipihak Palestina diwakili oleh bendaharawan PLO yaitu, Ahmad Qurai yang kemudian dikenal dengan Abu

ala'. Mereka bertiga bekerja sebagai pemain utama dalam menetapkan konseptual dari persetujuan Israel-Palestina (Marwah:63).

Negosiasi ini kemudian, menghasilkan Oslo Agreement yang ditandatangani di Washington D.C. Amerika Serikat pada hari senin tanggal 13 September 1993. Palestina diwakili oleh Yasser Arafat dari PLO dan Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin sebagai perwakilan dari Israel. Pada saat itu hadir pula Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang bertindak sebagai saksi dalam momentum bersejarah tersebut. Walaupun penandatanganan dilakukan di Amerika Serikat, tetapi kesepakatan ini dicapai melalui beberapa negosiasi yang dilakukan di Oslo dan akhirnya berhasil disepakati pada akhir Agustus 1993. Dengan demikian Oslo Agreement dirasakan sebagai nama yang paling tepat untuk dokumen bersejarah tersebut.

Oslo Agreement pun tercipta, dan menjadi salah satu harapan dan bukti akan kemajuan usaha damai untuk kedua belah pihak. Adapun tujuan dari perjanjian tersebut adalah menyerukan penarikan mundur pasukan Israel dari beberapa bagian di Jalur Gaza dan Tepi Barat dan memastikan hak Palestina untuk membentuk pemerintahan sendiri di dua kawasan melalui pembentukan Otoritas Palestina. Adapun hasil yang disepakati pada Oslo Agreement tersebut adalah Pertama, Jalur Gaza dan Tepi Barat dibagi dalam tiga Zona, dibawah kendali Palestina, dibawa kendali Israel, dan dibawah kendali Israel dan Palestina. Kedua, kedua belah pihak menandatangani Letters of Mutual Recognition. Ketiga, Pembentukan Pemerintahan Palestina yang mandiri di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kesepakatan ini memuat pengakuan bersama antara Israel dan PLO, serta lima tahun transisi dimana Israel akan menarik mundur pasukannya dan pembentukan Palestinian Authority (PA) sebagai pemerintahan Palestina sementara hingga negara Palestina dibentuk (Marwah:64). Pada akhir periode transisi akan ada penyelesaian yang permanen didasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB no.242 dan 338.

Dengan adanya kesepakatan yang terjadi pada tanggal 13 September 1993, yang diakhiri dengan jabat tangan Yitzak Rabin dan Yasser Arafat menjadi simbol penyelesaian permasalahan antara dua bangsa. Penyelesaian ini didasarkan atas

kompromi mengenai pembagian Palestina. Pembagian ini pada dasarnya bukanlah ide baru, karena sebelumnya sudah diajukan oleh PBB pada tahun 1947, namun ditolak oleh Palestina yang pada saat itu bersikeras memiliki Palestina secara Keseluruhan. Tapi kini dengan berhasilnya negosiasi yang melahirkan Perjanjian Oslo ini, baik Israel maupun Palestina telah menerima rencana pembagian Palestina tersebut. Kedua belah pihak terlihat telah mengesampingkan perselisihan mereka mengenai siapa yang berhak atas Palestina dan beralih untuk menemukan solusi bagi permasalahan mereka. Ide pembagian Palestina kini sudah diterima oleh kedua belah pihak, yang telah sekian lama saling berperang untuk memiliki tanah Palestina secara keseluruhan sebagai bagian dari wilayahnya.

Masih belum jelas apakah peran A.S. yang lebih aktif dalam negosiasi dapat berfungsi untuk mengurangi masalah ini. Clinton tetap terpisah karena sebagian saluran negosiasi lainnya terjadi bersamaan, termasuk di Washington, dan mungkin percaya bahwa kemajuan substantif tidak dapat dibuat tanpa keterlibatan yang tak tergantikan dari Amerika Serikat. Selain itu, Clinton tidak menganggap PLO sebagai mitra perundingan yang layak, dan menganggap jalur negosiasi Suriah sebagai prioritas yang lebih besar. Clinton tidak terlalu menganggap PLO dikarenakan mereka tidak terlalu berkuasa atas daerah Palestina, masih ada kelompok-kelompok lain di Palestina seperti Hamas, dan Fatah. PLO walaupun diakui sebagai wakil sah rakyat Palestina nyatanya tidak terlalu berkuasa dan hanya memegang sedikit kekuasaan bersama beberapa kelompok lain.

Sementara kehadiran mediator pihak ketiga yang ditentukan dapat mengarahkan para pihak ke resolusi yang lebih menentukan, kurangnya keterlibatan AS di Oslo mempertanyakan perannya sebagai satu-satunya broker perjanjian yang sangat diperlukan. Namun, keruntuhan akhir kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kemajuan berkelanjutan tidak dapat dibuat tanpa adanya pihak ketiga yang menentukan.

5.2.3. Wye River 1998

Perundingan Wye River merupakan usaha presiden Clinton untuk menundukan kembali kedua belah pihak ke depan meja perundingan sejak desember 1997. Berkat usaha intensif AS untuk mengatasi jalan buntu, Israel dan Palestina berhasil memulai kembali proses perundingan yang sempat terhenti selama berbulan-bulan. Setelah mengalami kebuntuan dalam proses perdamaian, Clinton berusaha untuk melibatkan kembali pihak-pihak yang bertikai tersebut dengan mengundang Netanyahu dan Arafat ke Perkebunan Sungai Wye di Maryland untuk melanjutkan pembicaraan. Clinton dan para penasihatnya terlibat dalam mediasi balik dan terus-menerus untuk membantu para pihak mencapai kompromi. Ini kembali ke gaya yang lebih tradisional dari diplomasi formal menghasilkan beberapa tingkat kemajuan. Sementara Arafat setuju untuk mendukung keamanan dan mencabut bagian piagam PLO yang mempertanyakan hak Israel untuk ada, Israel berjanji untuk mundur dari daerah Palestina dan lebih jauh akan membebaskan tahanan orang Palestina. Masalah muncul terutama dalam proses implementasi; Pemerintah sayap kanan Netanyahu menolak untuk melakukan penarikan, dengan mengklaim bahwa orang-orang Palestina tidak mematuhi keamanan. Jenis kemunduran ini menggambarkan efek kecenderungan politik para pemimpin kontemporer terhadap dinamika pelaksanaan. Dalam hal ini, penolakan Netanyahu terhadap persyaratan Oslo menginformasikan keenggannya untuk memberlakukan tindakan perdamaian seperti yang direncanakan (Rocfeller Center, 2015:18-19)

Ketika Benjamin Netanyahu menggantikan pemerintahan Simon Peres, cenderung tidak menerima hasil kesepakatan sebelumnya dan menunda implementasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sikap Netanyahu ini menimbulkan desakan dari berbagai pihak, hingga pada akhirnya ia bersedia untuk melanjutkan kembali hasil kesepakatan Oslo. Implementasi Oslo ini diteruskan melalui kesepakatan Wye River pada tanggal 23 Oktober 1998.

Proses negosiasi ini kembali melibatkan pemain utama antara Israel dan PLO. Tujuan yang ingin dicapai dari negosiasi tersebut adalah penerapan kesepakatan sementara yang disepakati pada Perjanjian Oslo II tahun 1995.

Tetapi, para pemain ini menghadapi situasi yang dilematis. Presiden Palestina Yasser Arafat harus menyelamatkan citranya di mata Hamas dan sempalan Fatah, lewat persetujuan damai yang dapat membuktikan bahwa Kesepakatan Oslo belum habis riwayatnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun ingin memperbaiki citranya di mata masyarakat Internasional yang selama ini menuduhnya sebagai penghambat utama proses perdamaian (Marwah:67).

Masalah yang lainnya adalah, proses penyelesaian konflik Israel-Palestina seakan berlomba dengan waktu. Yasser Arafat telah berkali-kali mengancam akan mendeklarasikan negara Palestina pada 4 Mei 1999, bila tidak setapak pun proses negosiasi berjalan maju. Benjamin Netanyahu sebaliknya mengancam akan menganeksasi kembali Jalur Gaza dan kota-kota Tepi Barat. Sudah dapat diprediksi apa yang akan terjadi jika ancaman dari kedua pihak itu terjadi. Oleh karena itu, Memorandum Wye River ini merupakan proses perundingan Israel-Palestina yang paling kritis, sejak Konferensi Madrid pada tahun 1991 dengan hanya menggunakan dua pilihan: berhasil atau pertumpahan darah. Namun celakanya, memorandum ini tidak dilandasi oleh adanya kemauan politik yang kuat sehingga fondasinya rapuh. Inilah yang membuat pelaksanaan memorandum tersebut, yang semula dijadwalkan hanya empat atau lima hari tertunda menjadi lebih dari sepekan. Bahkan delegasi dari Israel pada tanggal 21 Oktober mengancam akan mengundurkan diri jika tuntutan keamanannya tidak dipenuhi oleh pihak Palestina (Marwah:68).

Adapun hasil dari perundingan ini hanya menyelesaikan seperangkat agenda yang tidak dirampungkan selama bertahun-tahun. Mulai dari masalah jalan aman Jalur Gaza-Tepi Barat, bandara udara dan pelabuhan di Jalur Gaza, pembangunan kawasan industri dekat Jalur Gaza, pembebasan tawanan Palestina di penjara Israel, penarikan pasukan Israel tahap kedua dan tahap ketiga dari Tepi Barat, serta penjelasan jadwal waktu dari mana serta ke mana pasukan Israel harus mundur dari Tepi Barat (lihat Lampiran 3). Namun kemudian, meletusnya intifadah Al-Aqsa pada September 2000 dan adanya serangan dari Israel, maka perjanjian ini tidak terwujud (Kompas, 7 Juni hal 1, Perlu Napas yang Panjang: Diplomasi tetap jadi salah satu solusi konflik Israel-Palestina).

5.2.3. Camp David II 2000

Pada akhir masa jabatannya yang kedua, Clinton merancang sebuah usaha terakhir untuk mendorong para pihak yang bertikai tersebut untuk menuju penyelesaian konklusif melalui diplomasi KTT tradisional, mengundang Arafat dan Perdana Menteri baru Barak Israel ke Camp David untuk memperdebatkan isu-isu yang diperdebatkan mengenai perbatasan, keamanan, permukiman, dan hak untuk kembali. Sementara Clinton mengajukan proposal berkaitan dengan perbatasan kedua pihak dan penarikan pemukiman Israel yang tampaknya sesuai untuk kedua belah pihak, mereka akhirnya tidak dapat mengatasi jalan buntu yang tak terkendali di Jerusalem. Arafat mencari kedaulatan Palestina atas seluruh Jerusalem Timur, namun Barak tetap tidak mau menyerahkan wilayah-wilayah tertentu. Meski Clinton mencoba mengembangkan solusi kreatif seperti menetapkan "kedaulatan terbatas" Palestina atas lingkungan dalam. Namun, Arafat akhirnya menolak tawaran terakhir, dengan menyatakan, "Jika saya menandatangani kesepakatan ini, saya akan terbunuh." Mengikuti kegagalan perundingan tersebut, Clinton dan beberapa penasihatnya menyalahkan pihak Arafat. Apakah Arafat semata-mata untuk disalahkan tetap diperdebatkan (Kuncahyono,2012:277-278).

Pada bulan juni 2000 Amerika Serikat yang pada saat itu masih dibawah pemerintahan Bill Clinton mendorong kembali proses negosiasi keduanya melalui pertemuan di Camp David. Bill Clinton mengutus Madeleine Albright ke Timur Tengah untuk menemui Perdana Menteri Ehud Barak dan Presiden Palestina guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Kesepakatan akhir Israel-Palestina yang dihasilkan melalui perundingan rahasia di Israel selama Sembilan putaran, kemudian pada putaran kesepuluh dipindahkan ke Swedia untuk menghindari dari suhu politik domestik.

Tujuan dari diadakannya perundingan ini adalah untuk memecahkan status final konflik Israel-Palestina. Adapun Isi masalah yang akan diselesaikan sebagai berikut:1)Menyangkut Kota Yerusalem; 2) Menyangkut diaspora Palestina; 3) Tentang negara Palestina. Dalam perundingan yang berlangsung selama tiga belas

hari yang dimulai dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2000 tersebut, kedua belah pihak belum menemukan titik temu terhadap beberapa isu terkait seperti isu diaspora Palestina dan mengenai keberadaan Yerusalem yang dianggap sangat krusial. Setiap kesepakatan yang dibangun sebelumnya, belum pernah dibahas secara terperinci mengenai isu-isu sentral konflik Israel-Palestina seperti batas final, status Yerusalem, dan diaspora Palestina. Ketiga masalah ini kemudian menjadi sangat sulit untuk dipecahkan, dan masih dalam proses pencarian format yang sesuai bagi proses perdamaian Israel-Palestina (Marwah:77-78).

Sementara pembicaraan Camp David merupakan upaya perdamaian yang paling layak dalam sejarah konflik, banyak faktor politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan perundingan tersebut. Pertama, para pihak mengalami dampak karena menunda masalah paling kompleks di Oslo; Selain itu, Clinton gagal mempersiapkan negosiasi dengan sendirinya; dia tidak memiliki informasi lengkap mengenai posisi garis para pihak yang bertikai dan sepertinya berimprovisasi saat diskusi dibuka, menunda Jerusalem sampai hari-hari terakhir KTT. Namun, yang terpenting adalah dasar substantif untuk diskusi mengenai isu-isu inti adalah kekuatan pendorong di balik gagalnya kesepakatan, karena sedikit kemajuan dalam perselisihan ini telah dicapai dalam tujuh tahun sejak Oslo. Setelah KTT tersebut, keputusan Clinton untuk menyalahkan Arafat memiliki efek mengklasifikasi KTT tersebut sebagai kegagalan absolut; Hal ini memperlemah rasa percaya di antara para pihak dan merongrong kemajuan yang telah dicapai. Dengan pecahnya intifadah kedua dan akhir masa jabatan kedua Clinton, kesempatan untuk perdamaian sepertinya telah berlalu.

BAB 6 AKHIR DARI PROSES PERDAMAIAN ISRAEL PALESTINA TAHUN 1991-2002

Amerika Serikat walaupun memiliki pengaruh besar di kancah perpolitikan internasional, tetapi usaha untuk mendamakan konflik Israel-Palestina menemui jalan buntu. Berikut akan dijelaskan mengapa proses perdamaian yang diupayakan oleh Amerika Serikat menemui kegagalan,

6.1 Kegagalan Proses Perdamaian

Proses perdamaian antara Israel dan Palestina mendapat angin segar setelah kemenangan Amerika Serikat dalam perang teluk II. Dunia saat itu beranggapan bahwa dengan kekuasaan Amerika Serikat yang begitu besar di Timur Tengah usai berakhirnya perang teluk dapat memuluskan jalan perdamaian yang dirintis oleh Amerika Serikat (Husein, 1995:viii). Tanda positifnya proses perdamaian Timur Tengah dimulai dengan konferensi Madrid.

Konferensi Madrid yang mempertemukan banyak negara Timur Tengah ternyata dihadiri oleh semua negara yang diundang. Bahkan Israel dan Palestina setuju untuk ikut konferensi ini tanpa adanya iming-imingan apapun dari Amerika Serikat (Rais). Seolah pihak yang bertikai itu sadar bahwa jalan terbaik yang bisa mereka tempuh adalah mengikuti konferensi ini apapun nanti hasilnya. Daripada mereka terus berkonflik dan tidak menghasilkan apa-apa hanya menghasilkan korban jiwa maupun material semata (Rais,1993:59).

Akhir Oktober 1991 dunia menyaksikan lembaran sejarah baru dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Pihak Israel dan Palestina akhirnya bertemu untuk pertama kalinya untuk membicarakan masalah perdamaian di Madrid, Spanyol. Pemimpin atau negara yang memimpin dalam pertemuan itu adalah Amerika Serikat dan uni soviet. Walaupun uni Soviet lebih berperan simbolik daripada substantif. Amerika Serikat menjadi aktor utama penggerak perdamaian yang diperani oleh menlu Jamaes baker (Rais, 1992:59).

Konferensi Madrid berjalan cukup baik dan dilanjutkan dengan beberapa konferensi selanjutnya. Namun angin segar diawal dimulainya konferensi Madrid

ternyata tidak bertahan lama hingga tercipta perdamaian yang hakiki di Timur Tengah. Dalam konferensi-konferensi selanjutnya proses perdamaian yang dimotori oleh Amerika Serikat ini menemui jalan buntu. Kedua belah pihak yang bertikai sama-sama bersikeras untuk mempertahankan tuntutan-tuntutan mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena kedua negara memang memiliki kepentingan masing-masing yang saling bertentangan.

Sekitar 6 bulan setelah konferensi tersebut proses perdamaian antara Israel dan Palestina belum memperoleh hasil yang nyata. Karena dalam proses selanjutnya dalam pertemuan kedua negara yang berkonflik di Washington dc. Kedua negara tidak memperoleh kata sepakat, sehingga dengan tidak dicapainya kesepakatan lanjutan maka kedua belah pihak sekarang tidak memiliki kesepakatan bersama yang bisa dijadikan akomodasi untuk proses penyelesaian konflik Israel Palestina (Habibullah:35).

Israel di bawah Yitzak Samir yang bergaris keras tampak dengan jelas mempersulit proses perundingan dengan jalan mematok posisi yang mustahil bagi Palestina. Karena itu perundingan di Washington hanya berputar di masalah prosedural semata. Shamir dengan tegas tidak akan melepaskan wilayah yang telah mereka duduki di tanah Palestina. Sementara itu tekanan kepada Israel agar bersikap lebih lunak terus menguat. Sehingga banyak pihak di Israel menginginkan bahwa Shamir dapat dilengserkan dan pemerintahan digantikan oleh partai buruh, yang diharapkan akan membawa perubahan positif dalam proses perdamaian di Timur Tengah (Rais, 1992:59).

Kemenangan partai buruh di bawah Yitzhak Rabin memunculkan harapan-harapan baru dalam proses perdamaian Timur Tengah. Andaikata partai likud tetap berkuasa di Israel maka dapat dipastikan bahwa proses perdamaian mengalami deadlock. Namun walaupun pemerintahan Israel sudah berganti namun proses perdamaian ini tetap saja mengalami jalan buntu. Walaupun dibawah Yitzhak Rabin ini tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak di Oslo, namun kesepakatan Oslo tetap tidak dapat memperlancar perdamaian di Timur Tengah. Kegagalan ini dikarenakan beberapa hal yang oleh kedua belah pihak

tidak bisa dinegosiasikan, salah satunya adalah masalah Jerusalem (Kuncahyono,2010:276).

Selain masalah kota Jerusalem ada beberapa masalah lain yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Seperti masalah yang menyangkut Kota Yerusalem. Kota Jerusalem tetap tidak terbagi lagi dan menjadi ibukota Israel. Namun, akan dibentuk lembaga walikota di Yerusalem Barat dan Timur. Lembaga walikota di Yerusalem Timur memiliki hak otonomi sektor sipil seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota akan dikuasai oleh Palestina. Bendera Palestina akan dikibarkan di atas masjid Al-Aqsa. Status tempat-tempat suci kristiani di Yerusalem Timur akan dirundingkan lagi antara Israel dan Palestina. Palestina langsung menolak pemecahan masalah seperti itu, mereka tidak ingin membagi kota Jerusalem dengan Israel.

Masalah lain adalah menyangkut diaspora Palestina, diaspora Palestina tahun 1948, dimana Israel pada prinsipnya setuju untuk menampung 100.000 diaspora dalam jangka waktu sepuluh tahun, khususnya yang berada di Libanon Selatan. Diaspora Palestina itu akan dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, diaspora yang bisa kembali ke Israel dan Palestina. Kedua, diaspora yang akan ditempatkan secara abadi di Libanon dan menjadi warga Libanon. Ketiga, diaspora yang akan ditempatkan diluar Libanon dan negara Arab lainnya. Diaspora Palestina tahun 1967.

Diaspora ini dibagi menjadi tiga kategori juga. Pertama, mereka yang berdiaspora sebelum 1967 tidak dapat lagi kembali ke wilayah Palestina. Kedua, mereka yang berdiaspora antara bulan Juni dan September 1967 bisa kembali lagi ke Palestina. Jumlah mereka yang diperkirakan 300 ribu orang akan dipulangkan lagi ke Palestina secara bertahap selama sepuluh tahun. Ketiga, mereka yang berdiaspora setelah bulan September 1967, tidak bisa kembali lagi. Konferensi internasional akan digelar untuk membahas pendanaan dan ganti rugi bagi Palestina yang akan ditempatkan di luar negara Arab.

Ketiga masalah tentang negara Palestina. Israel bersedia mengakui negara Palestina sebagai negara yang merdeka sebagai bagian dari kesepakatan final kedua belah pihak. Wilayah Palestina yang akan disetujui Israel tersebut hanya

akan menguasai wilayah: (a) 68 persen wilayah Tepi Barat yang terbagi dalam tiga kantong dan 90 persen wilayah Jalur Gaza. (b) 14 persen wilayah Tepi Barat akan disewakan pada Israel selama 99 tahun. (c) 20 persen wilayah tepi barat akan dianeksasi oleh Israel (The Israeli Camp David II Proposal for Final Settelement. Pada: <http://www.mideastweb.org/campdavid2.htm>, diakses 15 Februari 2018).

Konferensi Tingkat Tinggi Camp David berakhir pada tanggal 25 Juli 2000, pertemuan ini tidak menghasikan penyelesaian yang tuntas bagi kedua belah pihak. Pertemuan ini bagi banyak orang dianggap sebagai pertemuan perdamaian terakhir sebelum konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas dengan terjadinya intifadah kedua. KTT Camp David ini hanya menghasilkan kesepakatan antara ketiga negara, kesepakatan tersebut tertuang dalam *trilateral stattlement*. Kesepakatan tersebut berisi bahwa perdamaian akan dilanjutkan secepatnya dan juga menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah mediator yang paling baik bagi kedua negara (lihat lampiran B.4). *Trilateral stattlement* hanyalah sebuah pemanis bagi pertemuan Camp David, dan tidak banyak berdampak pada proses perdamaian selanjutnya. KTT Camp David tahun 2000 merupakan usaha terakhir Amerika Serikat dalam mendamiakan konflik Israel Palestina, karena setelah KTT tersebut konflik Israel dan Palestina kembali memanas.

Pokok masalah yang oleh kedua belah pihak selalu dipertahankan mati-matian dan tidak pernah ada kompromi adalah masalah kota Jerusalem. Kedua belah pihak sama-sama mengakui Jerusalem sebagai miliknya sendiri. Berbagai solusi yang telah diberikan untuk menguasai masalah kota Jerusalem ini tidak pernah diterima oleh kedua belah pihak. Seperti membagi kota tersebut menjadi dua, atau kota Jerusalem pengelolaanya diserahkan kepada perwakilan kedua negara. Semua usul itu ditolak. Karena masalah kota Jerusalem inilah proses perdamaian antara Israel dan Palestina menemui jalan buntu. Jika permasalahan mengenai Jerusalem dapat diselesaikan bukan tidak mungkin perdamaian antara Israel dan Palestina bisa terlaksana di masa mendatang.

6.2 Penolakan Yaser Arafat

Salah satu sebab mengapa perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina gagal adalah mengenai nasib kota Jerusalem. Kota Jerusalem ini merupakan jantung dari konflik antara kedua negara. Niscaya jika permasalahan tentang kota ini dapat terselesaikan, mungkin konflik antara Israel dan Palestina akan segera berakhir. Status kota Jerusalem ini memang sangat tidak jelas. Kedua negara masing-masing mengklaim bahwa kota Jerusalem ini adalah milik mereka sendiri.

Kedua pemimpin negara dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa Jerusalem adalah milik mereka. Seperti pernyataan Yaser Arafat dalam sebuah pidato di Afrika Selatan pada tanggal 10 Mei 1994. Arafat mengatakan “saya mengatakan ini untuk memberi bukti apa yang mereka katakan bahwa Jerusalem itu ibu kota mereka tidak benar. Jerusalem sama sekali bukan ibu kota mereka. Jerusalem adalah ibukota kami” dalam kesempatan lain Arafat juga mengatakan “Jerusalem telah dan akan tetap menjadi ibu kota Palestina, semuanya untuk Palestina”. Pernyataan Arafat tersebut menunjukkan betapa Palestina sangat memperjuangkan Jerusalem dan tidak akan melepas mereka (Kuncahyono,2010:255).

Hal senada juga dikatakan oleh rival mereka yakni Israel. Simon Peres yang merupakan presiden Palestina dengan tegas menjawab sebuah pertanyaan tentang Jerusalem. Menurut Simon Peres sebaiknya masalah Jerusalem dibicarakan nanti pada lain kesempatan. Dengan memberikan jawaban seperti itu, ia sebenarnya sama dengan para pemimpin Israel lainnya. Peres berpendapat bahwa masalah Jerusalem sudah final; Jerusalem adalah satu, tak terpisahkan dan merupakan ibu kota Israel. Tentu saja ini adalah klaim dari Israel (Kuncahyono,2010:255).

Klaim dari kedua negara tersebut menimbulkan pertanyaan, bahwa sebenarnya Jerusalem itu milik siapa. Kalau kita tanya kepada orang Israel tentunya Israel akan menjawab sebagai milik Israel. Israel selalu menyatakan bahwa posisi legal internasional Jerusalem berasal dari mandat Palestina (Palestine mandate, 24 Juli 1922), yang mana liga bangsa-bangsa menjadi sumber

utama legitimasi internasional PBB-mengakui hubungan historis bangsa Yahudi dengan Palestina dan menghendaki Palestina sebagai *national home* bagi bangsa Yahudi. madat tersebut tidak memisahkan Jerusalem dari Palestina. Sehingga menurut mandat ini seluruh tanah Palestina merupakan *national home* bagi orang Yahudi termasuk kota Palestina (Muchsin:339-340).

Sementara Palestina mengakui Jerusalem sebagai milik warga Palestina atas dasar klaim pada agama, sejarah, dan jumlah penduduk Palestina di kota Jerusalem. Dalam setiap kesempatan pihak Palestina juga selalu mengklaim bahwa Jerusalem adalah milik Palestina dan bukan milik Israel.

Saling klaim terus terjadi, status Jerusalem itu sangat terkait dengan masa perdamaian Timur Tengah, bahkan barangkali perdamaian dunia. rasanya tidak akan pernah ada penyelesaian konflik Israel Palestina kalau tidak ada penyelesaian masalah Jerusalem. Dengan kata lain bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina baru bisa tercapai jika masalah Jerusalem ini sudah selesai dan diterima dengan secara baik oleh kedua belah pihak. Dan pada gilirannya pun dunia akan merasa tenang jika masalah Israel dan Palestina dapat terselesaikan, karena permasalahan itu merupakan sumber pergolakan dunia (Kuncahyono,2010:278).

Setiap kali digelar perundingan antara Israel dan Palestina menyangkut status Jerusalem selalu tidaklah mudah dicapai suatu kesepakatan. Bahkan bukannya tidak mudah perdamaian selalu menemui jalan buntu. Dan hal ini berlangsung berkali-kali disetiap acara perundingan perdamaian. Hal ini terjadi karena Jerusalem mengikat begitu kuat baik hati maupun pikiran kedua belah pihak. Ketika membicarakan masalah Jerusalem, tak satupun kedua belah pihak bersedia menyerah. Masing-masing mengklaim memiliki hak atas wilayah kota itu. Masing-masing menyatakan memiliki tempat-tempat suci di wilayah tersebut.

Berbagai gagasan untuk menyelesaikan masalah Jerusalem sudah beberapa kali dilaksanakan. Namun semua itu selalu gagal, seperti solusi yang menginginkan Jerusalem akan dijadikan sebagai kota internasional, tetapi gagasan ini gagal ditengah jalan. Selain gagasan menjadikan Jerusalem sebagai kota internasional pernah juga ada gagasan untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibu

kota bersama kedua negara, Israel dan Palestina. Namun gagasan ini juga ternyata tidak dapat dilaksanakan (Kuncahyono,2010:278).

Tahun 1993 ketika terjadi pertemuan Oslo antara Israel dan Palestina yang melahirkan kesepakatan Oslo, sebenarnya mencerminkan perubahan fundamental dalam permasalahan Jerusalem. Saat itu disepakati bahwa Palestina akan membentuk pemerintahan sementara Palestina, yang di dalamnya dimasukkan wilayah Jerusalem secara tidak jelas. Nantinya Jerusalem ini akan dibicarakan pada kesempatan lainnya. Namun walaupun begitu perdana menteri Israel Yitzhak Rabin dengan tegas tetap menyatakan bahwa Israel berdaulat penuh atas Jerusalem. Pada tanggal 27 Juni 1995 Rabin berbicara kepada sekelompok siswa sekolah di Tel Aviv; menurut Rabin, jika harus menyerahkan Jerusalem demi terciptanya perdamaian, maka lebih baik tidak perlu ada perdamaian. Rabin menegaskan bahwa Jerusalem akan terus berada di bawah pangkuan Israel. Tentu saja sikap Rabin ini menjadi penghalang bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah.

Walaupun pada perjanjian Oslo sudah dibahas bahwa masalah Jerusalem dapat diperundingkan. Namun formula penyelesaiannya tetap pada resolusi dewan keamanan PBB nomor 242 dan 338, yang menyerukan penarikan mundur secara penuh pasukan pendudukan Israel dari wilayah Palestina termasuk Jerusalem. Tujuh tahun setelah pelaksanaan perjanjian Oslo 1993, Ehud Barak menjadi perdana menteri yang baru bagi Israel. Ehud Barak lah yang menjadi presiden pertama Israel yang mau mempertimbangkan pembagian Jerusalem sebagai jawaban atas proposal AS dalam pertemuan puncak di Camp David. Pertemuan dilaksanakan pada 11-24 Juli tahun 2000 yang dihadiri oleh presiden AS Bill Clinton, perdana menteri Israel Ehud Barak dan ketua otoritas Palestina Yaser Arafat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk merundingkan penyelesaian final konflik Israel Palestina berdasarkan pada kesepakatan Oslo 1993 (verat:3).

Jerusalem menjadi isu utama dalam KTT tersebut. Palestina memandang Jerusalem timur sebagai wilayah pendudukan yang direbut Israel pada perang enam hari, 1967. Dan menjadi bagian yang diamanatkan untuk diselesaikan oleh resolusi 242 yang diterbitkan oleh dewan keamanan PBB. Oleh karena itu

Palestina menuntut penarikan secara total pasukan Israel dari wilayah pendudukan ke garis perbatasan 4 juni 1967, sebelum perang pecah. Sementara bagi Israel Jerusalem timur merupakan wilayahnya yang tak terpisahkan setelah direbut dalam perang 1967 (Kuncahyono,2010:280).

Pembahasan tentang Jerusalem bermula dari proposal yang disodorkan oleh AS kepada kedua negara. Hal-hal penting yang disodorkan AS adalah 1) Palestina berdaulat penuh atas wilayah muslim di kota lama; 2) Israel berdaulat penuh atas wilayah Yahudi dan armenia di kota lama; 3) wilayah temple mount akan berada di bawah kedaulatan Israel dengan konsep contodianship (Vera:3).

Ada proposal AS yang kedua yakni menyangkut temple mount, Palestina menganggap bahwa wilayah temple mount akan dibagi kedaulatannya bagi Israel dan Palestina. Palestina akan menguasai segala sesuatu yang ada di atas tanah, sementara Israel berdaulat atas segala sesuatu yang berada di bawah tanah. Wilayah-wilayah pinggiran Jerusalem yang dihuni orang-orang Palestina akan berada di bawah kedaulatan Palestina, sementara wilayah di sekitaran kota lama akan berada di bawah penguasaan Palestina secara fungsional namun dalam kerangka kedaulatan Israel. Orang-orang Palestina memahami hal ini sebagai pemerintahan sendiri (Kuncahyono,2010:280)

Usulan seperti itu yang ditanggapi berbeda oleh Ehud Barak dan Yaser Arafat. Pada saat itu Jerusalem hampir lepas dari tangan Israel, pada perundingan tersebut barak setuju untuk menyerahkan kedaulatan sebageian besar daerah pinggiran Jerusalem timur kepada Palestina serta menyerahkan kedaulatan atas wilayah muslim dan kristen di kota lama dan pemeliharaan atas tempat tersuci yudaisme, temple mount kepada Palestina. Baru pertama kali ini wilayah Jerusalem yang direbut Israel selama perang 1967 kembali dibagi, tindakan barak ini mendapat kecaman keras di dalam negeri Israel.

Akan tetapi tindakan berani Barak untuk mendapatkan kedamaian di Timur Tengah tersebut ternyata tetap tak menuai hasil. Usulan pembagian Jerusalem ternyata ditolak oleh Yaser Arafat. Dengan ditolaknya usulan tersebut oleh Yaser Arafat maka perjanjian Camp David 2000 mengalami kegagalan total. Perdamaian Timur Tengah yang didambakan pun urung terlaksana. Yaser Arafat menolak

pembagian kota Jerusalem dikarenakan kebanyakan warga Palestina tidak akan mau membagi kota Jerusalem apapun yang terjadi. Jadi sikap Arafat ini dapat dipahami sebagai sikap kebanyakan warga Palestina. Jika Arafat menyetujui pembagian Jerusalem maka sama saja ia dengan mengkhianati warga Palestina. Arafat tidak ingin dibenci oleh rakyat Palestina karena melakukan sesuatu yang dibenci oleh kebanyakan rakyat. Oleh karena itulah Arafat dengan tegas menolak pembagian kota Jerusalem.

Penolakan Arafat selain didasari karena opini publik Palestina juga dikarenakan dukungan dari pemerintah Mesir dan Arab Saudi. Pemerintah Mesir dan Arab Saudi meminta agar Arafat pantang menyerah memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina (<http://www.nytimes.com/2000/07/opinion/failure-at-camp-david.html>). Karena dukungan dari kedua negara tetangga inilah Yaser Arafat semakin berani untuk memperjuangkan segala hak rakyat Palestina. Namun sikap keras kepala Arafat ini harus dibayar mahal dengan gagalnya perdamaian antara Israel dan Palestina yang sudah begitu dekat dan sangat didambakan oleh seluruh orang, bukan hanya orang Israel dan Palestina tetapi juga seluruh dunia. Karena sikapnya inilah banyak orang yang menganggap bahwa kegagalan di Camp David tahun 2000 dikarenakan sikap Yaser Arafat. Banyak orang menyalahkan Arafat sebagai penyebab gagalnya perdamaian antara Israel dan Palestina.

BAB 7. PENUTUP

7.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang upaya Amerika Serikat dalam melakukan proses perdamaian antara Israel dan Palestina adalah dikarenakan kepentingan nasional Amerika Serikat di Timur Tengah. Kepentingan Amerika Serikat tersebut selalu berdasarkan tiga hal yakni minyak, Israel, dan stabilitas kawasan. Politik luar negeri Amerika Serikat akan selalu berdasarkan ketiga hal tersebut. Amerika Serikat akan melakukan apapun untuk bisa melancarkan tiga kepentingan tersebut. Amerika Serikat harus menjaga stabilitas daerah Timur Tengah agar suplai minyak dari daerah tersebut ke Amerika tidak terhambat, dan merugikan ekonomi Amerika Serikat. Stabilitas kawasan Timur Tengah hanya bisa tercapai jika konflik antara Israel dan Palestina dapat diselesaikan. Amerika Serikat mendapatkan momen tersebut ketika berakhirnya perang teluk. Berakhirnya Perang Teluk memberikan kesempatan yang terbuka lebar bagi Amerika Serikat untuk mengatur ulang kawasan Timur Tengah menurut keinginannya. Dengan kuasa yang besar setelah kemenangan di Perang Teluk Amerika Serikatpun mulai bergerak untuk mengatur ulang keamanan di Timur Tengah dan salah satu cara agar keamanan di Timur Tengah bisa tercapai adalah mendamaikan konflik antara Israel dan Palestina. Dikarenakan berbagai hal inilah Amerika Serikat mulai aktif dalam memediasi kedua negara tersebut untuk melaksanakan pertemuan guna membicarakan perdamaian.

Didorong berbagai hal yang melatarbelakangi, akhirnya Amerika mulai berperan aktif dalam masalah perdamaian di Timur Tengah. Ditambah lagi Amerika Serikat waktu itu adalah negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah. Posisi kuat Amerika ini memberikan Amerika waktu yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian. Maka demi terciptanya perdamaian di Timur Tengah serta melindungi kepentingannya Amerika Serikat memulai agendanya mendamaikan Timur Tengah dengan mengundang negara yang bertikai untuk

hadir dalam pertemuan perdamaian. Kadangkala Amerika juga harus menekan salah satu negara agar mau ikut berunding, seperti yang dialami Israel dengan diancam bahwa mereka tidak akan mendapat pinjaman dana senilai 10 milyar dolar jika Israel tidak mau ikut dalam meja perundingan. Tekanan Amerika tersebut berhasil memaksa Israel untuk ikut ambil bagian dalam meja perundingan. Amerika Serikat semakin aktif dalam upayanya untuk mendamiakan Israel dan Palestina ketika masa akhir jabata Bill Clinton. Pada masa akhir jabatannya Clinton mengundang kedua negara yang berkonflik ini untuk bertemu di Wye River dan Camp David. Amerika Serikat memainkan peran aktif dalam kedua pertemuan tersebut walaupun sayang bahwa pertemuan tersebut harus berujung kegagalan. Amerika Serikat dalam upayanya mendamiakan Israel dan Palestina berhasil mempertemukan kedua belah pihak dalam beberapa perundingan yakni Perundingan Madrid, Perundingan Oslo, Perundingan Wye River, dan terakhir Perundingan Camp David.

Proses perdamaian yang diusahakan oleh Amerika Serikat akhirnya berujung dengan kegagalan. Dalam perundingan Camp David II, kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, dikarenakan Israel dan Palestina tetap ingin mempertahankan status kota Jerusalem sebagai kota milik masing-masing negara. Perundingan Camp David akhirnya mencapai jalan buntu, perundingan yang berlangsung dari 11 sampai 25 Juli tersebut tidak menghasilkan kesepakatan penting sama sekali. Permasalahan yang menyebabkan perundingan Camp David mandeknya KTT Camp David adalah masalah kota Jerusalem, hal inilah yang membuat proses perdamaian berjalan alot. Padahal di beberapa sektor sudah banyak tercapai kesepakatan seperti masalah pengungsi, namun dalam masalah kota Jerusalem ini kedua negara tidak mau kompromi. Ketika pelaksanaan KTT di Camp David Amerika Serikat mengusulkan agar kota Jerusalem dijadikan kota bersama antara Israel dan Palestina. Palestina dengan tegas menolak usulan Amerika tersebut, karena penolakan inilah banyak yang menyalahkan Yaser Arafat sebagai penyebab kegagalan perdamaian. Gagalnya KTT Camp David menandai kegagalan Proses Perdamaian antara Israel dan Palestina, ditambah lagi

tak lama setelah gagalnya perundingan Camp David munculah intifaldah kedua, yag mengakibatkan konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas.

7.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) bagi pihak Amerika Serikat seharusnya bersikap lebih adil dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, akan tetapi lebih mendahulukan kepentingan bersama selama itu menyangkut banyak pihak. Karena dalam konflik yang terjadi melibatkan banyak pihak. Sehingga perdamaian antara Israel dan Palestina dapat cepat terwujud.
- 2) bagi Israel dan Palestina terlebih Israel tidak serakah dalam pengambilan hak tanah warga Palestina, patuhi resolusi-resolusi yang telah ditetapkan oleh PBB dan patuhi kesepakatan bersama yang tertuang dalam setiap perjanjian perdamaian, untuk Palestina jangan hanya menggunakan kekerasan dan ingin menang sendiri.
- 3) bagi negara- negara Islam dan negara yang terlibat dalam konflik maupun proses penyelesaiannya tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tercapai hubungan yang harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bennis, P. 2003. *Before & After: U.S. Foreign Policy and the September 11th Crisis*. New York: Olive Branch Press.
- Gottschalk, L. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Habibullah, A. 1994. *Hubungan Internasional di Timur Tengah Pasca Perang Teluk*. Jember. Universitas Jember.
- Hermawati. 2005. *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Holsti, K. J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Jakarta: Bina Cipta.
- Husein, M. 1995. *Prospek Perdamaian di Timur Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirjo. S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncahyono, T. 2010. *Jerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*. Jakarta: Kompas.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kurniawan, A. 2013. *Terorisme Negara Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mahler, G. S. 2009. *The Arab-Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader*. London: Routledge

Mansbach, R. W. & Rafferty, K. L. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media.

mfa.gov.il, Declaration of Principles, <http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20israeli-palestinian%20interim%20agreement.aspx>. (Diakses 3 Februari 2017).

Peace Indonesia. Kepentingan Amerika Serikat Di Timur Tengah. https://peaceindonesia.wordpress.com/kepentingan-Amerika_Serikat-serikat-di-timur-tengah/ (Diakses pada 30 Nopember 2017).

Peacemaker.un.org. Wye River Memorandum, <https://peacemaker.un.org/israelopt-wyerivermemorandum98>, (Diakses 2 Maret 2018)

Rais, M, A. 1989. *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya: Usaha Nasional.

Rais, M, A. 1993. *Himpunan Naskah Ceramah Masalah Timur Tengah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Dep. Luar Negeri bekerjasama dengan Pusat Studi dan pengkajian masalah Timur Tengah Universitas Gadjah Mada

Rocefeller Center. 2015. *Time for a Change: The Role of the United States in the Israeli-Palestinian Conflict*. Hannover: Rocefeller Center

Santoso, S, E, B. 2011. Strategi Pemerintah Amerika Serikat Dalam Mengatasi Krisis Minyak Bumi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Sihbudi, R. 1993. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT Eresco.

Sihbudi dkk. 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

Silaban, R. A. S. 2011. "Tersendat-Sendatnya Pemulihan Damai Antara Israel dan Palestina di Bawah Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu". Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

- Sjamsudin, H. 1996. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Sodik, A. 2015. “Hambatan Palestina dalam Upaya Memperoleh Status Keanggotaan Penuh di PBB Tahun 2011”. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Soekanto. S. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Solichien, Y, M. 2008. Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam Penyelesaian Kasus Invasi Irak Terhadap Kuwait (Tahun 1990-1991). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wikipedia, Balfour Declarations, https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration, (Diakses 29 Januari 2018)
- Wildana, D. T. 2009. konflik Israel-Palestina: studi terhadap konsep perdamaian di Timur Tengah. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga.
- Windhu, I, M. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

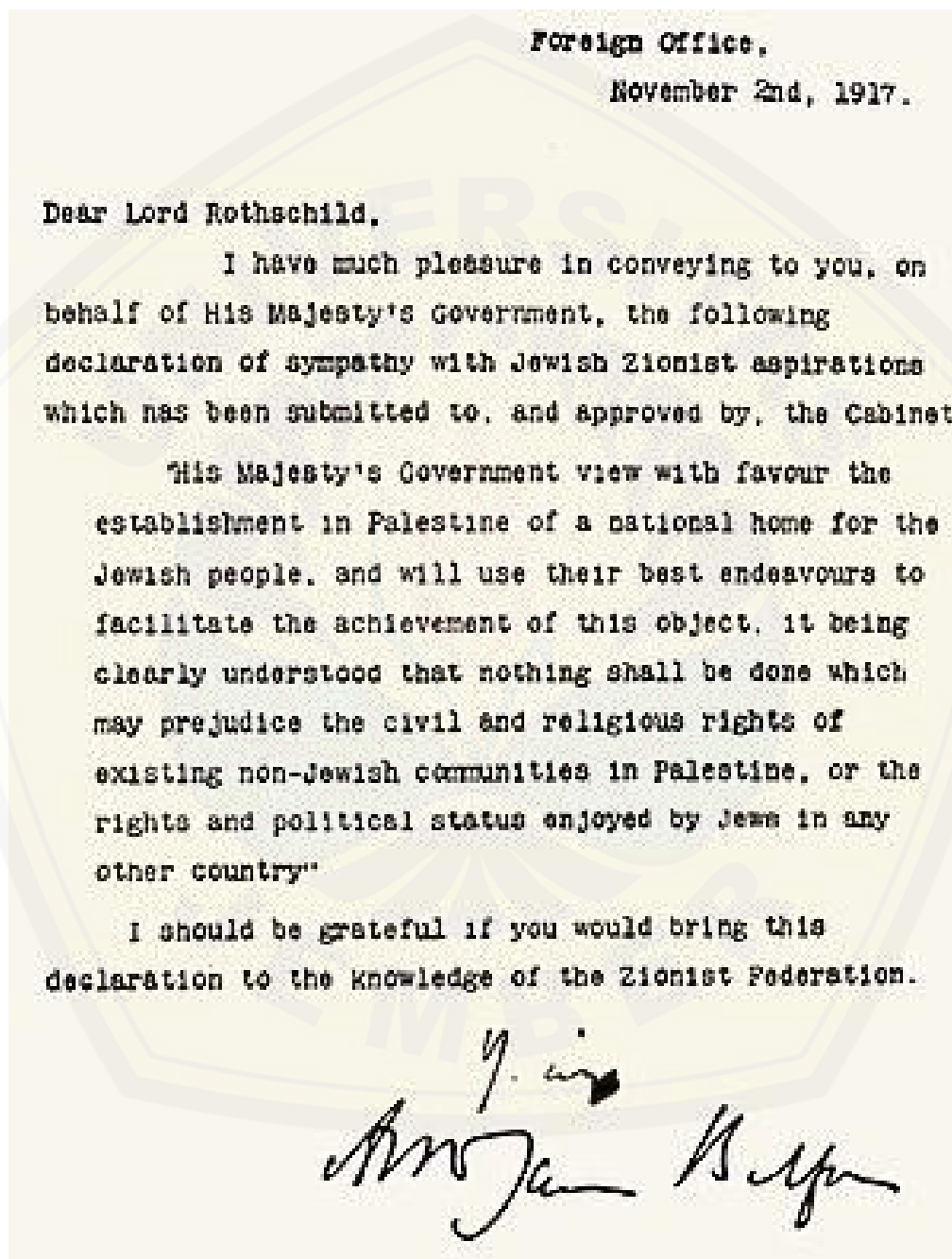
LAMPIRAN

A. Matrik Penelitian

TOPIK	JUDUL PENELITIAN	PERMASALAHAN	JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	SUMBER DATA
Sejarah Asia Barat	Peranan Amerika Serikat dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002	1. Mengapa Amerika melakukan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tahun 1991-2002? 2. Upaya yang dilakukan Amerika dalam perdamaian Israel Palestina 1991-2002? 3. Mengapa Amerika Serikat gagal dalam penyelesaian perdamaian Israel dan Palestina 1991-2002?	Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah Sifat Penelitian: Penelitian Studi Pustaka	1. Buku-buku 2. Skripsi 3. Jurnal 4. Artikel 5. Internet Tempat pencarian Sumber: a) Perpustakaan Universitas Jember b) Pesrpustakaan sejarah Kelamas

B. Dokumen

B.1 Naskah Deklarasi Balfour²



² Wikipedia.com, Balfour Declaration, https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration . juga (The Arab-Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader. London: Routledge. Hal:198-201)

B. 2. Perjanjian Oslo

Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements September 13, 1993³

The Government of the State of Israel and the P.L.O. team (in the Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) (the "Palestinian Delegation"), representing the Palestinian people, agree that it is time to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process. Accordingly, the, two sides agree to the following principles:

ARTICLE I

AIM OF THE NEGOTIATIONS

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, the elected Council (the "Council"), for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions [242](#) and [338](#).

It is understood that the interim arrangements are an integral part of the whole peace process and that the negotiations on the permanent status will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338.

ARTICLE II

FRAMEWORK FOR THE INTERIM PERIOD

The agreed framework for the interim period is set forth in this Declaration

³ Mahler, G. S. 2009. *The Arab-Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader*. London: Routledge. Hal:198-201

ARTICLE III**ELECTIONS**

1. In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council under agreed supervision and international observation, while the Palestinian police will ensure public order.
2. An agreement will be concluded on the exact mode and conditions of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the goal of holding the elections not later than nine months after the entry into force of this Declaration of Principles.
3. These elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements.

ARTICLE IV**JURISDICTION**

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

ARTICLE V**TRANSITIONAL PERIOD AND PERMANENT STATUS****NEGOTIATIONS**

1. The five-year transitional period will begin upon the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area.
2. Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than the beginning of the third year of the interim

period, between the Government of Israel and the Palestinian people representatives.

3. It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.
4. The two parties agree that the outcome of the permanent status negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached for the interim period.

ARTICLE VI

PREPARATORY TRANSFER OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

1. Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the authorised Palestinians for this task, as detailed herein, will commence. This transfer of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of the Council.
2. Immediately after the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: education and culture, health, social welfare, direct taxation, and tourism. The Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed upon.

ARTICLE VII

INTERIM AGREEMENT

1. The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement on the interim period (the "Interim Agreement")
2. The Interim Agreement shall specify, among other things, the structure of the Council, the number of its members, and the transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the Council's executive authority, legislative authority in accordance with Article IX below, and the independent Palestinian judicial organs.
3. The Interim Agreement shall include arrangements, to be implemented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in accordance with Article VI above.
4. In order to enable the Council to promote economic growth, upon its inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development Bank, a Palestinian Export Promotion Board, a Palestinian Environmental Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Administration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance with the Interim Agreement that will specify their powers and responsibilities.
5. After the inauguration of the Council, the Civil Administration will be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn.

ARTICLE VIII

PUBLIC ORDER AND SECURITY

In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for

defending against external threats, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.

ARTICLE IX

LAWS AND MILITARY ORDERS

1. The Council will be empowered to legislate, in accordance with the Interim Agreement, within all authorities transferred to it.
2. Both parties will review jointly laws and military orders presently in force in remaining spheres.

ARTICLE X

JOINT ISRAELI-PALESTINIAN LIAISON COMMITTEE

In order to provide for a smooth implementation of this Declaration of Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues requiring coordination, other issues of common interest, and disputes.

ARTICLE XI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC FIELDS

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the development of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic Cooperation Committee will be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols attached as [Annex III](#) and [Annex IV](#).

ARTICLE XII**LIAISON AND COOPERATION WITH JORDAN AND EGYPT**

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the one hand, and the Governments of Jordan and Egypt, on the other hand, to promote cooperation between them. These arrangements will include the constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder. Other matters of common concern will be dealt with by this Committee.

ARTICLE XIII**REDEPLOYMENT OF ISRAELI FORCES**

1. After the entry into force of this Declaration of Principles, and not later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordance with Article XIV.
2. In redeploying its military forces, Israel will be guided by the principle that its military forces should be redeployed outside populated areas.
3. Further redeployments to specified locations will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article VIII above.

ARTICLE XIV**ISRAELI WITHDRAWAL FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA**

Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as [Annex II](#).

ARTICLE XV

RESOLUTION OF DISPUTES

1. Disputes arising out of the application or interpretation of this Declaration of Principles, or any subsequent agreements pertaining to the interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison Committee to be established pursuant to Article X above.
2. Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties.
3. The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration Committee.

ARTICLE XVI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL PROGRAMS

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate instrument for promoting a "Marshall Plan", the regional programs and other programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as indicated in the protocol attached as [Annex IV](#).

ARTICLE XVII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

1. This Declaration of Principles will enter into force one month after its signing.
2. All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part

hereof.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel

For the P.L.O.

Witnessed By:

The United States of America

The Russian Federation

ANNEX I

PROTOCOL ON THE MODE AND CONDITIONS OF ELECTIONS

1. Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to participate in the election process, according to an agreement between the two sides.
2. In addition, the election agreement should cover, among other things, the following issues:
 1. the system of elections;
 2. the mode of the agreed supervision and international observation and their personal composition; and
 3. rules and regulations regarding election campaign, including agreed arrangements for the organizing of mass media, and the possibility of licensing a broadcasting and TV station.
3. The future status of displaced Palestinians who were registered on 4th June 1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in the election process due to practical reasons.

ANNEX II**PROTOCOL ON WITHDRAWAL OF ISRAELI FORCES FROM
THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA**

1. The two sides will conclude and sign within two months from the date of entry into force of this Declaration of Principles, an agreement on the withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Israeli withdrawal.
2. Israel will implement an accelerated and scheduled withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, beginning immediately with the signing of the agreement on the Gaza Strip and Jericho area and to be completed within a period not exceeding four months after the signing of this agreement.
3. The above agreement will include, among other things:
 1. Arrangements for a smooth and peaceful transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the Palestinian representatives.
 2. Structure, powers and responsibilities of the Palestinian authority in these areas, except: external security, settlements, Israelis, foreign relations, and other mutually agreed matters.
 3. Arrangements for the assumption of internal security and public order by the Palestinian police force consisting of police officers recruited locally and from abroad holding Jordanian passports and Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate in the Palestinian police force coming from abroad should be trained as police and police officers.
 4. A temporary international or foreign presence, as agreed

- upon.
5. Establishment of a joint Palestinian-Israeli Coordination and Cooperation Committee for mutual security purposes.
 6. An economic development and stabilization program, including the establishment of an Emergency Fund, to encourage foreign investment, and financial and economic support. Both sides will coordinate and cooperate jointly and unilaterally with regional and international parties to support these aims.
 7. Arrangements for a safe passage for persons and transportation between the Gaza Strip and Jericho area.
4. The above agreement will include arrangements for coordination between both parties regarding passages:
 1. Gaza - Egypt; and
 2. Jericho - Jordan.
 5. The offices responsible for carrying out the powers and responsibilities of the Palestinian authority under this Annex II and Article VI of the Declaration of Principles will be located in the Gaza Strip and in the Jericho area pending the inauguration of the Council.
 6. Other than these agreed arrangements, the status of the Gaza Strip and Jericho area will continue to be an integral part of the West Bank and Gaza Strip, and will not be changed in the interim period.

ANNEX III

PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC AND DEVELOPMENT PROGRAMS

The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian continuing Committee for Economic Cooperation, focusing, among other things, on the following:

1. Cooperation in the field of water, including a Water Development

Program prepared by experts from both sides, which will also specify the mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water resources for implementation in and beyond the interim period.

2. Cooperation in the field of electricity, including an Electricity Development Program, which will also specify the mode of cooperation for the production, maintenance, purchase and sale of electricity resources.
3. Cooperation in the field of energy, including an Energy Development Program, which will provide for the exploitation of oil and gas for industrial purposes, particularly in the Gaza Strip and in the Negev, and will encourage further joint exploitation of other energy resources. This Program may also provide for the construction of a Petrochemical industrial complex in the Gaza Strip and the construction of oil and gas pipelines.
4. Cooperation in the field of finance, including a Financial Development and Action Program for the encouragement of international investment in the West Bank and the Gaza Strip, and in Israel, as well as the establishment of a Palestinian Development Bank.
5. Cooperation in the field of transport and communications, including a Program, which will define guidelines for the establishment of a Gaza Sea Port Area, and will provide for the establishing of transport and communications lines to and from the West Bank and the Gaza Strip to Israel and to other countries. In addition, this Program will provide for carrying out the necessary construction of roads, railways, communications lines, etc.
6. Cooperation in the field of trade, including studies, and Trade Promotion Programs, which will encourage local, regional and inter-

regional trade, as well as a feasibility study of creating free trade zones in the Gaza Strip and in Israel, mutual access to these zones, and cooperation in other areas related to trade and commerce.

7. Cooperation in the field of industry, including Industrial Development Programs, which will provide for the establishment of joint Israeli- Palestinian Industrial Research and Development Centers, will promote Palestinian-Israeli joint ventures, and provide guidelines for cooperation in the textile, food, pharmaceutical, electronics, diamonds, computer and science-based industries.
8. A program for cooperation in, and regulation of, labor relations and cooperation in social welfare issues.
9. A Human Resources Development and Cooperation Plan, providing for joint Israeli-Palestinian workshops and seminars, and for the establishment of joint vocational training centers, research institutes and data banks.
10. An Environmental Protection Plan, providing for joint and/or coordinated measures in this sphere.
11. A program for developing coordination and cooperation in the field of communication and media.
12. Any other programs of mutual interest.

ANNEX IV

PROTOCOL ON ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS

1. The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace efforts in promoting a Development Program for the region, including the West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G-7. The parties will request the G-7 to seek the participation in this program of other interested states, such as members of the Organisation for Economic Cooperation and Development, regional

Arab states and institutions, as well as members of the private sector.

2. The Development Program will consist of two elements:
 1. an Economic Development Program for the 'West Bank and the Gaza Strip.
 2. a Regional Economic Development Program.
 3. The Economic Development Program for the West Bank and the Gaza strip will consist of the following elements:
 1. A Social Rehabilitation Program, including a Housing and Construction Program.
 2. A Small and Medium Business Development Plan.
 3. An Infrastructure Development Program (water, electricity, transportation and communications, etc.)
 4. A Human Resources Plan.
 5. Other programs.
 4. The Regional Economic Development Program may consist of the following elements:
 1. The establishment of a Middle East Development Fund, as a first step, and a Middle East Development Bank, as a second step.
 2. The development of a joint Israeli-Palestinian-Jordanian Plan for coordinated exploitation of the Dead Sea area.
 3. The Mediterranean Sea (Gaza) - Dead Sea Canal.
 4. Regional Desalinization and other water development projects.
 5. A regional plan for agricultural development, including a coordinated regional effort for the prevention of desertification.
 6. Interconnection of electricity grids.
 7. Regional cooperation for the transfer, distribution and industrial exploitation of gas, oil and other energy

resources.

8. A Regional Tourism, Transportation and Telecommunications Development Plan.

9. Regional cooperation in other spheres.

3. The two sides will encourage the multilateral working groups, and will coordinate towards their success. The two parties will encourage intersessional activities, as well as pre-feasibility and feasibility studies, within the various multilateral working groups.

AGREED MINUTES TO THE DECLARATION OF PRINCIPLES ON INTERIM SELF-GOVERNMENT ARRANGEMENTS

A. GENERAL UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS

Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians pursuant to the Declaration of Principles prior to the inauguration of the Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set out in these Agreed Minutes below.

B. SPECIFIC UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS

Article IV

It is understood that:

1. Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis.
2. The Council's jurisdiction will apply with regard to the agreed powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it.

Article VI (2)

It is agreed that the transfer of authority will be as follows:

1. The Palestinian side will inform the Israeli side of the names of the

authorised Palestinians who will assume the powers, authorities and responsibilities that will be transferred to the Palestinians according to the Declaration of Principles in the following fields: education and culture, health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities agreed upon.

2. It is understood that the rights and obligations of these offices will not be affected.
3. Each of the spheres described above will continue to enjoy existing budgetary allocations in accordance with arrangements to be mutually agreed upon. These arrangements also will provide for the necessary adjustments required in order to take into account the taxes collected by the direct taxation office.
4. Upon the execution of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will immediately commence negotiations on a detailed plan for the transfer of authority on the above offices in accordance with the above understandings.

Article VII (2)

The Interim Agreement will also include arrangements for coordination and cooperation.

Article VII (5)

The withdrawal of the military government will not prevent Israel from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council.

Article VIII

It is understood that the Interim Agreement will include arrangements for cooperation and coordination between the two parties in this regard. It is also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian police will be accomplished in a phased manner, as agreed in the Interim Agreement.

Article X

It is agreed that, upon the entry into force of the Declaration of Principles, the Israeli and Palestinian delegations will exchange the names of the individuals designated by them as members of the Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee.

It is further agreed that each side will have an equal number of members in the Joint Committee. The Joint Committee will reach decisions by agreement. The Joint Committee may add other technicians and experts, as necessary. The Joint Committee will decide on the frequency and place or places of its meetings.

Annex II

It is understood that, subsequent to the Israeli withdrawal, Israel will continue to be responsible for external security, and for internal security and public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel

For the P.L.O.

Witnessed By:

The United States of America

The Russian Federation

Sumber: (mfa.gov.il. Declaration of Principles). (Mahler, 2009:198-201)

B.3. Perjanjian Wye River

The Wye River Memorandum⁴

The following are steps to facilitate implementation of the Interim Agreement on the West Bank and Gaza Strip of September 28, 1995 (the "Interim Agreement") and other related agreements including the Note for the Record of January 17, 1997 (hereinafter referred to as "the prior agreements") so that the Israeli and Palestinian sides can more effectively carry out their reciprocal responsibilities, including those relating to further redeployments and security respectively.

These steps are to be carried out in a parallel phased approach in accordance with this Memorandum and the attached time line. They are subject to the relevant terms and conditions of the prior agreements and do not supersede their other requirements.

I. FURTHER REDEPLOYMENTS

A. Phase One and Two Further Redeployments

1. Pursuant to the Interim Agreement and subsequent agreements, the Israeli side's implementation of the first and second F.R.D. will consist of the transfer to the Palestinian side of 13% from Area C as follows:

1% to Area (A)

12% to Area (B)

The Palestinian side has informed that it will allocate an area/areas amounting to 3% from the above Area (B) to be designated as Green Areas and/or Nature Reserves. The Palestinian side has further informed that they will act according to the established scientific standards, and that therefore there will be no changes in the status of these areas, without prejudice to the rights of the existing inhabitants

⁴ Mahler, G. S. 2009. *The Arab-Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader*. London: Routledge. Hal: 244-247

in these areas including Bedouins; while these standards do not allow new construction in these areas, existing roads and buildings may be maintained.

The Israeli side will retain in these Green Areas/Nature Reserves the overriding security responsibility for the purpose of protecting Israelis and confronting the threat of terrorism. Activities and movements of the Palestinian Police forces may be carried out after coordination and confirmation; the Israeli side will respond to such requests expeditiously.

2. As part of the foregoing implementation of the first and second F.R.D., 14.2% from Area (B) will become Area (A).

B. Third Phase of Further Redeployments

With regard to the terms of the Interim Agreement and of Secretary Christopher's letters to the two sides of January 17, 1997 relating to the further redeployment process, there will be a committee to address this question. The United States will be briefed regularly.

II. SECURITY

In the provisions on security arrangements of the Interim Agreement, the Palestinian side agreed to take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed against the Israeli side, against individuals falling under the Israeli side's authority and against their property, just as the Israeli side agreed to take all measures necessary in order to prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed against the Palestinian side, against individuals falling under the Palestinian side's authority and against their property.

The two sides also agreed to take legal measures against offenders within their jurisdiction and to prevent incitement against each other by any organizations, groups or individuals within their jurisdiction.

Both sides recognize that it is in their vital interests to combat terrorism and fight violence in accordance with Annex I of the Interim Agreement and the Note for the Record. They also recognize that the struggle against terror and violence must be comprehensive in that it deals with terrorists, the terror support structure, and the environment conducive to the support of terror. It must be continuous and

constant over a long-term, in that there can be no pauses in the work against terrorists and their structure. It must be cooperative in that no effort can be fully effective without Israeli-Palestinian cooperation and the continuous exchange of information, concepts, and actions.

Pursuant to the prior agreements, the Palestinian side's implementation of its responsibilities for security, security cooperation, and other issues will be as detailed below during the time periods specified in the attached time line:

A. Security Actions

1. Outlawing and Combating Terrorist Organizations

The Palestinian side will make known its policy of zero tolerance for terror and violence against both sides.

A work plan developed by the Palestinian side will be shared with the U.S. and thereafter implementation will begin immediately to ensure the systematic and effective combat of terrorist organizations and their infrastructure. In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a U.S.-Palestinian committee will meet biweekly to review the steps being taken to eliminate terrorist cells and the support structure that plans, finances, supplies and abets terror. In these meetings, the Palestinian side will inform the U.S. fully of the actions it has taken to outlaw all organizations (or wings of organizations, as appropriate) of a military, terrorist or violent character and their support structure and to prevent them from operating in areas under its jurisdiction.

The Palestinian side will apprehend the specific individuals suspected of perpetrating acts of violence and terror for the purpose of further investigation, and prosecution and punishment of all persons involved in acts of violence and terror.

A U.S.-Palestinian committee will meet to review and evaluate information pertinent to the decisions on prosecution, punishment or other legal measures which affect the status of individuals suspected of abetting or perpetrating acts of violence and terror.

2. Prohibiting Illegal Weapons

The Palestinian side will ensure an effective legal framework is in place to criminalize, in conformity with the prior agreements, any importation, manufacturing or unlicensed sale, acquisition or possession of firearms, ammunition or weapons in areas under Palestinian jurisdiction.

In addition, the Palestinian side will establish and vigorously and continuously implement a systematic program for the collection and appropriate handling of all such illegal items in accordance with the prior agreements. The U.S. has agreed to assist in carrying out this program.

A U.S.-Palestinian-Israeli committee will be established to assist and enhance cooperation in preventing the smuggling or other unauthorized introduction of weapons or explosive materials into areas under Palestinian jurisdiction.

3. Preventing Incitement

Drawing on relevant international practice and pursuant to Article XXII (1) of the Interim Agreement and the Note for the Record, the Palestinian side will issue a decree prohibiting all forms of incitement to violence or terror, and establishing mechanisms for acting systematically against all expressions or threats of violence or terror. This decree will be comparable to the existing Israeli legislation which deals with the same subject.

A U.S.-Palestinian-Israeli committee will meet on a regular basis to monitor cases of possible incitement to violence or terror and to make recommendations and reports on how to prevent such incitement. The Israeli, Palestinian and U.S. sides will each appoint a media specialist, a law enforcement representative, an educational specialist and a current or former elected official to the committee.

B. Security Cooperation

The two sides agree that their security cooperation will be based on a spirit of partnership and will include, among other things, the following steps:

1. Bilateral Cooperation

There will be full bilateral security cooperation between the two sides which will be continuous, intensive and comprehensive.

2. Forensic Cooperation

There will be an exchange of forensic expertise, training, and other assistance.

3. Trilateral Committee

In addition to the bilateral Israeli-Palestinian security cooperation, a high-ranking U.S.-Palestinian-Israeli committee will meet as required and not less than biweekly to assess current threats, deal with any impediments to effective security cooperation and coordination and address the steps being taken to combat terror and terrorist organizations. The committee will also serve as a forum to address the issue of external support for terror. In these meetings, the Palestinian side will fully inform the members of the committee of the results of its investigations concerning terrorist suspects already in custody and the participants will exchange additional relevant information. The committee will report regularly to the leaders of the two sides on the status of cooperation, the results of the meetings and its recommendations.

C. Other Issues

1. Palestinian Police Force

The Palestinian side will provide a list of its policemen to the Israeli side in conformity with the prior agreements. Should the Palestinian side request technical assistance, the U.S. has indicated its willingness to help meet these needs in cooperation with other donors. The Monitoring and Steering Committee will, as part of its functions, monitor the implementation of this provision and brief the U.S.

2. PLO Charter

The Executive Committee of the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Central Council will reaffirm the letter of 22 January 1998 from PLO Chairman Yasir Arafat to President Clinton concerning the nullification of the Palestinian National Charter provisions that are inconsistent with the letters exchanged between the PLO and the Government of Israel on 9/10 September 1993. PLO Chairman Arafat, the Speaker of the Palestine National Council, and the Speaker of the Palestinian Council will invite the members of the PNC, as well as the members of the Central Council, the Council, and the Palestinian Heads of Ministries to a meeting to be addressed by President Clinton to reaffirm

their support for the peace process and the aforementioned decisions of the Executive Committee and the Central Council.

3. Legal Assistance in Criminal Matters

Among other forms of legal assistance in criminal matters, the requests for arrest and transfer of suspects and defendants pursuant to Article II (7) of Annex IV of the Interim Agreement will be submitted (or resubmitted) through the mechanism of the Joint Israeli- Palestinian Legal Committee and will be responded to in conformity with Article II (7) (f) of Annex IV of the Interim Agreement within the twelve week period. Requests submitted after the eighth week will be responded to in conformity with Article II (7) (f) within four weeks of their submission. The U.S. has been requested by the sides to report on a regular basis on the steps being taken to respond to the above requests.

4. Human Rights and the Rule of Law

Pursuant to Article XI (1) of Annex I of the Interim Agreement, and without derogating from the above, the Palestinian Police will exercise powers and responsibilities to implement this Memorandum with due regard to internationally accepted norms of human rights and the rule of law, and will be guided by the need to protect the public, respect human dignity, and avoid harassment.

III. INTERIM COMMITTEES AND ECONOMIC ISSUES

1. The Israeli and Palestinian sides reaffirm their commitment to enhancing their relationship and agree on the need actively to promote economic development in the West Bank and Gaza. In this regard, the parties agree to continue or to reactivate all standing committees established by the Interim Agreement, including the Monitoring and Steering Committee, the Joint Economic Committee (JEC), the Civil Affairs Committee (CAC), the Legal Committee, and the Standing Cooperation Committee.

2. The Israeli and Palestinian sides have agreed on arrangements which will permit the timely opening of the Gaza Industrial Estate. They also have concluded

a "Protocol Regarding the Establishment and Operation of the International Airport in the Gaza Strip During the Interim Period."

3. Both sides will renew negotiations on Safe Passage immediately. As regards the southern route, the sides will make best efforts to conclude the agreement within a week of the entry into force of this Memorandum. Operation of the southern route will start as soon as possible thereafter. As regards the northern route, negotiations will continue with the goal of reaching agreement as soon as possible. Implementation will take place expeditiously thereafter.

4. The Israeli and Palestinian sides acknowledge the great importance of the Port of Gaza for the development of the Palestinian economy, and the expansion of Palestinian trade. They commit themselves to proceeding without delay to conclude an agreement to allow the construction and operation of the port in accordance with the prior agreements. The Israeli-Palestinian Committee will reactivate its work immediately with a goal of concluding the protocol within sixty days, which will allow commencement of the construction of the port.

5. The two sides recognize that unresolved legal issues adversely affect the relationship between the two peoples. They therefore will accelerate efforts through the Legal Committee to address outstanding legal issues and to implement solutions to these issues in the shortest possible period. The Palestinian side will provide to the Israeli side copies of all of its laws in effect.

6. The Israeli and Palestinian sides also will launch a strategic economic dialogue to enhance their economic relationship. They will establish within the framework of the JEC an Ad Hoc Committee for this purpose. The committee will review the following four issues: (1) Israeli purchase taxes; (2) cooperation in combating vehicle theft; (3) dealing with unpaid Palestinian debts; and (4) the impact of Israeli standards as barriers to trade and the expansion of the A1 and A2 lists. The committee will submit an interim report within three weeks of the entry into force of this Memorandum, and within six weeks will submit its conclusions and recommendations to be implemented.

7. The two sides agree on the importance of continued international donor assistance to facilitate implementation by both sides of agreements reached. They

also recognize the need for enhanced donor support for economic development in the West Bank and Gaza. They agree to jointly approach the donor community to organize a Ministerial Conference before the end of 1998 to seek pledges for enhanced levels of assistance.

IV. PERMANENT STATUS NEGOTIATIONS

The two sides will immediately resume permanent status negotiations on an accelerated basis and will make a determined effort to achieve the mutual goal of reaching an agreement by May 4, 1999. The negotiations will be continuous and without interruption. The U.S. has expressed its willingness to facilitate these negotiations.

V. UNILATERAL ACTIONS

Recognizing the necessity to create a positive environment for the negotiations, neither side shall initiate or take any step that will change the status of the West Bank and the Gaza Strip in accordance with the Interim Agreement.

ATTACHMENT: Time Line

This Memorandum will enter into force ten days from the date of signature.

Done at Washington, D.C. this 23d day of October 1998.

For the Government of the State of Israel: Benjamin Netanyahu

For the PLO: Yassir Arafat

Witnessed by: William J. Clinton The United States of America

Sumber: Peacemaker.un.org. Wye River Memorandum. (Mahler, 2009:244-247)

B.4. Hasil KTT Camp David 2000

Trilateral Statement on the Middle East Peace Summit at Camp David (July 25, 2000)⁵

President William J. Clinton

Israeli Prime Minister Ehud Barak

Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat

Between July 11 and 24, under the auspices of President Clinton, Prime Minister Barak and Chairman Arafat met at Camp David in an effort to reach an agreement on permanent status. While they were not able to bridge the gaps and reach an agreement, their negotiations were unprecedented in both scope and detail. Building on the progress achieved at Camp David, the two leaders agreed on the following principles to guide their negotiations:

- 1) The two sides agreed that the aim of their negotiations is to put an end to decades of conflict and achieve a just and lasting peace.
- 2) The two sides commit themselves to continue their efforts to conclude an agreement on all permanent status issues as soon as possible.
- 3) Both sides agree that negotiations based on UN Security Council Resolutions 242 and 338 are the only way to achieve such an agreement and they undertake to create an environment for negotiations free from pressure, intimidation and threats of violence.
- 4) The two sides understand the importance of avoiding unilateral actions that prejudice the outcome of negotiations and that their differences will be resolved only by good faith negotiations.
- 5) Both sides agree that the United States remains a vital partner in the search for peace and will continue to consult closely with President Clinton and Secretary Albright in the period ahead.

⁵ Mahler, G. S. 2009. *The Arab-Israeli Conflict: An Introduction and Documentary Reader*. London: Routledge. Hal: 261

